



**IMPLEMENTASI NILAI DASAR PERJUANGAN  
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM  
DALAM PEMBINAAN KADER  
Suatu Telaah terhadap Pemikiran Nurcholish Madjid  
Pada Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Palembang**

**Tesis  
Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Akademik  
Guna memperoleh Gelar Magister Humaniora (M.Hum)  
dalam Program Studi Sejarah Peradaban Islam  
Konsentrasi Islam di Indonesia**

**Oleh:**

**HERYATI  
NIM : 090301090**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2012**

## **Bab 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang Masalah**

Pada hakikatnya, perilaku beragama yang melekat dalam kehidupan komunitas muslim merupakan personifikasi institusional yang merepresentasikan mazhab tertentu. Perilaku yang muncul dalam praktek keagamaan bukan semata-mata hasil pemahaman individual terhadap sumber ajaran Islam, yakni al-Qur'an dan Sunnah, melainkan tidak terlepas dari faktor genetis, ideologis, sosiologis, dan intelektualitas. (Saebani 2007, hal. 9).

Dalam konteks kajian tesis ini personifikasi nilai dasar institusional yang dimaksud disinyalir juga berlaku di lingkungan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Kota Palembang. Organisasi HMI sendiri seperti yang dimaklumi adalah sebuah organisasi mahasiswa Islam yang cukup tua di Indonesia, yang berdiri di Yogyakarta pada tahun 1947. (Sitompul, 2007, hal. 56).

Berbicara tentang kiprah sebuah organisasi yang cukup tua, seperti halnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), adalah tak terlepas dari kontribusi pemikiran para tokoh intelektual yang menjadi aktor utama organisasi masing-masing. Dalam lingkup HMI salah seorang tokoh utama yang dimaksud adalah Nurcholis Madjid.

Tak dapat dipungkiri bahwa corak berpikir keislaman Nurcholis Madjid (selanjutnya akan disebut Cak Nur), dianggap cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter berpikir keislaman HMI, baik secara institusional maupun personal.

Dalam lingkungan HMI Cak Nur menjadi tauladan. Para kadernya tak jarang mengutip pemikiran-pemikirannya. Karya-karya Cak Nur seperti menjadi referensi wajib bagi mereka, sehingga tulisan, perkataan dan gagasan-gagasan mereka memiliki

kemiripan intelektual yang nyaris seragam. Sebagai rujukan, Cak Nur memang menempati posisi dominan dibanding dengan tokoh-tokoh lainnya dan ini menyebabkan generasi muda setelah Cak Nur dikritik sebagai generasi yang tidak mandiri dan sangat bergantung pada sosok Cak Nur (Sitompul 2007, hal. 63).

Fakta-fakta ini kiranya cukup untuk menyebut bahwa Cak Nur berjasa dalam meletakkan dasar-dasar perubahan bagi masyarakat. Dalam konteks pengkaderan, Cak Nur berjasa bagi pembentukan bakat-bakat intelektual muda di lingkungan kampus dan organisasi HMI. (Sitompul 2007, hal. 81).

Pengaruh Cak Nur semakin terasa ketika selama masih aktif di HMI, Cak Nur menyusun sebuah dokumen sebagai bagian dari silabus perkaderan HMI, khususnya menyangkut materi keislaman yang saat itu dianggapnya kurang mendapat tempat yang memadai ketimbang materi-materi organisasi dan politik. Materi yang disusun Cak Nur ini dikenal dengan “Nilai-Nilai Dasar Perjuangan, selanjutnya disingkat NDP HMI.” (Azhari Akmal Tarigan 2007,hal. 23).

Dalam tulisannya, Cak Nur mengisahkan bahwa semula NDP ini ingin dinamakan Nilai Dasar Islam (NDI), akan tetapi kesan klaimnya cukup tinggi, seolah-olah hanya inilah nilai Islam, maka ini dihindari dan kemudian disesuaikan dengan aktifitas HMI yakni sebagai organisasi mahasiswa. Selanjutnya Cak Nur menemukan sebuah buku yang ditulis oleh Willy Eicher dengan judul *The Fundamental Values and Basic Demand of Democratic Sosialism* (Nilai-Nilai Dasar dan Tuntutan-Tuntutan Asasi Sosialisme Demokrat). Dari buku inilah Cak Nur terinspirasi untuk mengambil istilah “Nilai-Nilai Dasar”. Sedangkan kata perjuangan diambil dari buku Syahrir yang berjudul *Perjuangan Kita*, maka jadilah NDP tersebut. (Nurcholis Madjid, 1990, hal. 43). Konsep ini kemudian dibawa ke Kongres HMI ke-IX periode 1966-1969 di Malang untuk diformalkan menjadi dokumen resmi organisasi. (ART HMI 2006, hal. 56). Menurut Cak Nur, bahwa selain keindonesiaan dan kemahasiswaan, kualifikasi

HMI sebagai gerakan pemuda adalah keislaman, maka selain harus tampil sebagai pendukung nilai-nilai keindonesiaan dan kemahasiswaan, HMI juga harus tampil sebagai pendukung nilai-nilai keislaman. Sekalipun dukungan pada nilai-nilai keislaman itu tetap dalam format yang tidak dapat dipisahkan dari keindonesiaan dan kemahasiswaan. Artinya, penghayatan HMI pada nilai-nilai keislaman itu tidak dapat lepas dari lingkungan keindonesiaan (antara lain demi efektifitas dan fungsionalitas keislamannya itu sendiri), dan juga tidak terlepas dari nilai kemahasiswaan (yaitu suatu pola penghayatan keislaman yang lebih cocok dengan kelompok masyarakat yang menikmati hak istimewa sebagai anggota *civitas academica*). (Madjid, 1997, hal. 89).

Secara umum pengaruh pemikiran keislaman Cak Nur terhadap HMI tampak di dalam dokumen NDP yang disusun Cak Nur dalam beberapa bab di antaranya; Dasar-dasar Kepercayaan, Pengertian Dasar Tentang Kemanusiaan, Ketuhanan Yang Maha Esa dan Masalah Kemanusiaan, Kebebasan Manusia (Ikhtiar) dan Keharusan Universal (Takdir), Individu dan Masyarakat, Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi, dan Ilmu Pengetahuan. (Dokumen PB HMI). Yang membuat Cak Nur termotivasi untuk menyusun NDP HMI adalah untuk memberi panduan bagi kader HMI agar bisa memahami Islam dengan baik dalam dimensi ruang dan waktu dan menjadi acuan untuk memahami Islam secara lebih komprehensif dan rasional. (Azhari Akmal Tarigan 2007, hal. 2-3).

Kemudian dari periode ke periode, dokumen NDP itu sejak adanya hingga sekarang, selain berfungsi sebagai tafsir asas ke-Islam-an HMI. NDP juga menjadi rujukan penting dalam setiap proses pengkaderan HMI, khususnya dalam pemberian materi-materi keislaman. Bahkan untuk memahami NDP ini, dalam pengkaderan HMI, dialokasikan waktu khusus untuk menjabarkan NDP secara utuh dan komprehensif. Dalam NDP HMI tidak ditemukan bahasan tentang ajaran-ajaran yang bersifat teknis fihiyah, namun lebih memuat nilai-nilai yang bersifat universal, maka NDP menjadi

sangat sulit dipahami. Bukan hanya itu, karena pembahasannya yang sulit dipahami dan ini menurut Cak Nur disengaja karena NDP dimaksudkan sebagai kumpulan nilai, maka penguraian/penjelasan NDP dalam proses pengkaderan di setiap HMI cabang pun menjadi sangat beragam. (ART HMI 2006)

Pada hakikatnya semangat kelahiran NDP HMI paralel dengan semangat kelahiran HMI itu sendiri, hanya saja dalam kasus NDP, Cak Nur sangat berperan dalam mengkonseptualisasikannya secara lebih sistematis, utuh dan komprehensif. (Sitompul, 2007, hal. 179-185).

Dari penjelasan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa NDP HMI yang disusun Cak Nur mendapat tempat yang cukup kuat bagi pembentukan karakter berpikir keislaman HMI. Hal ini menandakan bahwa pemahaman keislaman HMI cukup kuat dipengaruhi oleh sosok Cak Nur.

NDP HMI yang dikonseptualkan Cak Nur ini juga begitu berpengaruh dengan HMI Cabang Palembang karena dijadikan semacam pondasi yang kuat di dalam tubuh HMI itu sendiri, NDP yang dikukuhkan oleh Cak Nur menjadikan HMI berbeda dengan organisasi lainnya, sebagai ciri khas yang hanya dimiliki oleh setiap kader HMI termasuk kader HMI cabang Palembang, untuk itulah peneliti merasa perlu melihat fenomena yang terjadi di tubuh HMI cabang Palembang dalam mengaplikasikan NDP yang dijadikan pedoman oleh Cak Nur tersebut, seyogyanya penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi nilai-nilai pemikiran Nurcholis Madjid terhadap kader di Lingkungan HMI Cabang Palembang

### **Rumusan Masalah**

Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Nurcholis Madjid dalam rumusan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI?

2. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh HMI Cabang Palembang dalam mengimplementasikan NDP di HMI Cabang Palembang?
3. Bagaimana pengaruh Pemikiran Nurcholis Madjid yang terkandung dalam NDP terhadap pembinaan kader HMI Cabang Palembang?

### **Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Nurcholis Madjid dalam rumusan NDP HMI
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh HMI Cabang Palembang dalam mengimplementasikan NDP pada HMI Cabang Palembang
3. Untuk menganalisis pengaruh pemikiran Nurcholis Madjid terhadap pembinaan kader HMI Cabang Palembang.

### **Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memperkaya khazanah intelektual dalam diskursus dan kajian-kajian keislaman, khususnya dalam bidang sejarah intelektual Islam
2. Kegunaan praktis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut terhadap konsep Nilai-Nilai Dasar Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (NDP-HMI) yang dirumuskan oleh Nurcholis Madjid, khususnya kepada kader-kader HMI cabang Palembang, dan kader-kader HMI pada umumnya.

### **Definisi Operasional**

Menurut Suryabrata (1997, hal. 76), definisi operasional adalah definisi yang didasarkan pada sifat yang dapat diamati”.

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan penulis yang berjudul *Implementasi Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI Dalam Pembinaan Kader HMI di Palembang (Suatu Telaah Terhadap Implementasi Pemikiran Nurcholis Madjid di Lingkungan HMI Kota Palembang)*, agar tidak terjadi kekeliruan interpretasi dalam memahami

pengertian judul tersebut, perlu memberikan makna yang konkrit bagi variabel-variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Untuk mendefinisikan operasional judul di atas, penulis menentukan variabel-variabel yang perlu untuk dijelaskan, yaitu variabel Implementasi, variabel Pemikiran dan variabel Pembinaan. Variabel-variabel tersebut sangat berpengaruh dalam tulisan ini. *Pertama*, kata *Implementasi* menurut **Kamus Umum Bahasa Indonesia** (Depdikbud 1991, hal. 45), bermakna “penerapan, pelaksanaan\* suatu pekerjaan”. Dalam **Kamus Khusus Bahasa Indonesia** (Poerwadarminta 1989, hal. 260), kata *implementasi* berarti perwujudan atau penerapan sesuatu, misalnya nilai-nilai atau suatu pandangan hidup tertentu atau kaidah-kaidah tertentu dalam kehidupan yang nyata.. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan implementasi adalah perwujudan atau penerapan nilai-nilai yang termaktub dalam NDP HMI dalam kehidupan organisasi HMI kota Palembang.

*Kedua*, kata *pemikiran*, menurut **Kamus Umum Bahasa Indonesia** (Depdikbud 1991, hal. 365) adalah proses perbuatan, cara memikirkan, problema yang memerlukan pemecahan. Dalam salah satu tulisannya, Fachri Ali mendefinisikan *pemikiran Islam* sebagai refleksi intelektual yang sistematis dalam menanggapi permasalahan individual, sosial-politik, ekonomi dan kebudayaan dari perspektif Islam. (Fachri Ali 1980, hal. 237). Yang dimaksud dalam variabel ini secara umum adalah keseluruhan pemikiran-pemikiran Nurcholish Madjid (Cak Nur). Namun, mengingat begitu banyaknya pemikiran yang pernah dilontarkan Cak Nur, maka terasa sangat naif untuk membahas dan menguraikannya secara keseluruhan dalam penelitian tesis ini. Oleh karena itu, hanya akan dibahas secara parsial pemikiran Cak Nur yang tertuang dalam rumusan konsep Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI yang disusun oleh

---

\*Dapat dilihat juga, bahwa kata implementasi bermakna pelaksanaan; penerapan. Dalam Abdul Ghoffar, *Kamus Indonesia-Arab, Istilah Umum dan Kata-Kata Populer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000, hal. 130).

Cak Nur sendiri. Meskipun demikian, orientasi dan pembahasan tesis ini juga tidak menutup kemungkinan akan dihubungkan dengan tema atau masalah lainnya dalam rangka memperkaya khazanah pembahasan. Seperti tema *Civil Society* (Masyarakat Madani serta Islam dan negara).

*Ketiga*, kata *pembinaan* menurut **Kamus Umum Bahasa Indonesia** (Depdikbud 1991, hal. 141) berarti pembangunan dan pembaruan. Dalam penelitian ini yang di maksud dengan pembinaan adalah suatu aktifitas perkaderan, baik perkaderan formal maupun nonformal dalam organisasi HMI. Sedangkan yang dimaksud dengan kader HMI adalah sebagaimana yang terumuskan dalam kongres ke-8 HMI tahun 1966, bahwa kader HMI adalah tulang punggung organisasi, pelopor, penggerak, pelaksana, penyelamat cita-cita HMI masa kini dan yang akan datang di manapun berada, tetap berorientasi kepada asas dan syariat Islam. (Sitompul 2004, hal. 3). Dengan demikian, defenisi operasional dalam penelitian ini adalah meliputi usaha *pembinaan kader HMI* dalam hal *penerapan nilai-nilai dasar* (nilai-nilai pokok) yang ideal, hasil *pemikiran* atau perenungan *Nurcholish Madjid* (Cak Nur) yang dikristalisasikan dan dijadikan sebagai azas bagi perjuangan *kader HMI*, dalam lingkup organisasi *HMI Kota Palembang*, yang secara organisatoris dan struktural sebagai bagian dari organisasi HMI di seluruh Indonesia.

### **Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan penulis terhadap berbagai literatur yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, tidak ditemukan pembahasan khusus yang fokus membahas tentang *Implementasi Nilai Dasar Perjuangan HMI dalam Pembinaan Kader HMI di Palembang*. Tetapi, meskipun demikian terdapat beberapa literatur yang terkait dengan studi ini, di antaranya adalah:

Tesis yang disusun oleh Hasanuddin M. Saleh dengan judul *Dinamika HMI dalam Isu Asas Tunggal Pancasila* (Saleh, 1996). Saleh dalam tesisnya ini membahas



dinamika pergerakan HMI yang pada masa itu berazaskan Islam, namun berhadapan dengan kebijakan pemerintah Orde Baru yang memberlakukan asas tunggal Pancasila bagi seluruh organisasi, maka HMI juga mengubah asasnya menjadi Pancasila pada kongres ke-XVI tahun 1986.

Disertasi yang disusun oleh Berliana Kartakusumah dengan judul *Pengembangan Kepemimpinan Tokoh HMI; Studi Kasus Tentang Performansi Proses Pembelajaran, Kepribadian, Visi, Kemampuan, Prestasi dan Penerimaan Lingkungan Tokoh HMI dalam Perspektif Pembelajaran Sepanjang Hayat*. (Kartakusumah, 2004). Dalam disertasi tersebut dikaji beberapa tokoh-tokoh HMI di antaranya adalah sosok Nurcholish Madjid yang oleh penulisnya dikategorikan sebagai sosok Muslim pembaharu.

Skripsi yang disusun oleh Abdul Aziz dengan judul *Posisi Ijtihad Dalam Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI* (Abdul Aziz, 2004). Di sini Abdul Aziz hanya mengungkapkan potensi dan peluang ijtihad yang terdapat dalam konsep Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI.

Buku yang dikarang oleh Nurcholis Madjid sendiri (1987); *Islam, Kemodernan dan Keindonesian*. Dalam bukunya ini Cak Nur mengangkat beberapa hal penting dalam menatap masa depan Indonesia yang lebih baik. *Pertama*, prospek sosialisme-religius di Indonesia suatu kebutuhan. *Kedua*, Islam dan masyarakat modern-industrial suatu tantangan. *Ketiga*, modernisme dan pembaruan pemikiran Islam adalah suatu keharusan.

Buku yang ditulis oleh Victor Immanuel Tanja (1991); *Himpunan Mahasiswa Islam*. Dalam karyanya ini, pengarang mengupas tentang sejarah HMI dan Kegiatan-kegiatannya. Disisi lain juga dibahas mengenai kedudukan Ideologi HMI dalam kaitannya dengan berbagai tantangan zaman.

Buku yang ditulis oleh Suharsono (1997); *HMI: Pemikiran dan Masa Depan*.

Dalam buku ini, penulis mengangkat beberapa hal krusial seputar HMI sebagai sebuah fenomena gerakan, yang mengimplementasikan suatu transformasi sosial, sebagaimana yang terjadi dan membentuk berbagai peradaban dan budaya, pada umumnya dicirikan oleh tiga hal pokok. *Pertama*, adanya nilai-nilai dasar yang diyakini, yang secara teologis, filosofis bahkan gnostik, memuat dimensi-dimensi keilahian, kebenaran, keadilan, kebaikan dan juga tujuan-tujuan jangka panjang. Di samping memuat kritik terhadap berbagai aspek kehidupan yang berkembang saat itu. *Kedua*, adanya sejumlah *martyr* atau orang-orang “terpilih” secara sadar menerapkan nilai-nilai tersebut serta berani mengambil resiko terhadap kemungkinan terjadinya berbagai benturan dengan praktek-praktek sosial yang sedang berlangsung. *Ketiga*, terjadinya proses transmisi nilai-nilai tersebut ke dalam spektrum sosial yang lebih luas, khususnya angkatan muda, yang kemudian berkembang sebagai kader-kader ideologis, yang kemudian menjadi semacam emberio suatu tipologi masyarakat baru yang merupakan refleksi sosiologis nilai-nilai tersebut.

Buku yang ditulis oleh Muhammad Hari Zamharir (2004); *Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis Madjid*. Dalam buku ini penulisnya mengangkat beberapa isu penting seputar pemikiran politik Cak Nur mengenai agama dan politik, sistem kenegaraan Pancasila dan agama-agama, primordialisme agama, dan landasan agama untuk pembangunan. Di samping itu juga dikemukakan wacana Cak Nur tentang Islam dan Negara serta *civil society*.

Karya-karya tersebut pada umumnya membahas tentang ide-ide pembaruan Cak Nur dalam bidang sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan, sosial politik, sosial budaya, dan tata kelola pemerintahan. Tetapi karya ini membahas aspek implementasi dari pemikiran-pemikiran Cak Nur yang hanya tertuang di dalam Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI dalam pembinaan kader HMI cabang Palembang.

Berdasarkan uraian mengenai hasil penelitian dan beberapa literatur di atas, maka

belum ditemukan adanya penelitian khusus mengenai *Implementasi Nilai Dasar Perjuangan HMI Dalam Pembinaan Kader HMI Cabang Palembang (Suatu telaah terhadap implementasi pemikiran Nurcholis Madjid di lingkungan HMI Kota Palembang)*.

### **Kerangka Teori**

Secara sederhana, sebagaimana dikemukakan dalam definisi operasional, bahwa [implementasi](#) diartikan, pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky dalam (Nurdin dan Usman 2004, hal. 70) mengemukakan, bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. [Pengertian implementasi](#) sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Maclaughin dalam (Nurdin dan Usman 2004, hal. 71). Adapun Schubert dalam (Nurdin 2002, hal. 58) mengemukakan, bahwa implementasi adalah sistem rekayasa.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan, bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Dalam konteks implementasi kurikulum Fullan dalam (Zurnali 2010, hal. 27) memberikan tekanan pada proses pendekatan. Esensinya, implementasi adalah proses yang mencakup tiga hal. *Pertama*, aktivitas yang digunakan untuk menstransfer ide/gagasan. *Kedua*, melaksanakan program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. *Ketiga*, dalam ungkapan mekanisme mengandung arti, bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, melainkan kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. (Zurnali 2010, hal. 27).

Dalam kaitannya dengan pendekatan-pendekatan di atas, bahwa *pendekatan pertama*, menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi)

kurikulum desain. Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru dan mendemonstrasikan metode pengajaran (pembinaan) yang digunakan. *Pendekatan kedua*, menurut Nurdin dan Usman (2004, hal. 76) menekankan pada fase penyempurnaan. Kata proses dalam pendekatan ini lebih menekankan pada interaksi antara pengembang dan [guru](#) (praktisi pendidikan). Pengembang melakukan pemeriksaan pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru, dan memasukan isi/materi baru ke program yang sudah ada berdasarkan hasil uji coba di lapangan dan pengalaman-pengalaman guru. Interaksi antara pengembang dan guru terjadi dalam rangka penyempurnaan program, pengembang mengadakan lokakarya atau diskusi-diskusi dengan guru-guru untuk memperoleh masukan. Implementasi dianggap selesai manakala proses penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap.

Sedangkan *pendekatan ketiga*, Nurdin dan Usman (2004, hal. 77) memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum desain (tertulis). Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan mengadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi) guna mencapai tujuan kegiatan organisasi.

Kurikulum dalam kaitannya dengan organisasi dapat disejajarkan dengan nilai dasar organisasi atau ideologi. Nilai Dasar, berarti azas, landasan, sudut pandang, falsafah, *wold view*, dan ideologi. (Suharsono 1997, hal. 28). Azas, yang dalam relevansinya dengan organisasi, berarti nilai dasar, persepsi, *élan vital*, penggerak, dan secara teologis berarti sasaran yang hendak dituju oleh organisasi. (Tanja 1991, hal. 105). Dalam spektrum yang lebih luas, azas memuat beberapa aspek penting, yang mencerminkan suatu model ideologi dari sebuah organisasi, terutama organisasi politik

atau massa. *Pertama*, azas atau azas organisasi harus memiliki derivasi presepsional yang menyeluruh tentang entitas-entitas penting kehidupan, misalnya Tuhan, alam dan manusia. *Kedua*, azas harus merupakan sumber nilai, norma dan sekaligus moralitas yang hakiki atau mutlak. *Ketiga*, setelah sebuah azas mampu menderivasikan nilai-nilai, norma dan moralitas, maka suatu hal yang perlu dihasilkan adalah paradigma perubahan atau *manhaj*. *Keempat*, yang juga tidak kalah pentingnya bagi azas atau ideologi organisasi adalah kesuciannya. (Suharsono 1997, hal. 28-29).

Hal di atas bila dikaitkan dengan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan yang ada di HMI selama ini dipercaya sebagai ideologi. Seperti diketahui, ideologi dipahami sebagai cara pandang pada hidup kita masing-masing. Menurut mazhab pemikiran baru, ideologi adalah konsepsi pemikiran yang melahirkan tindakan yang berhadapan dengan realitas. (Suharsono 1997, hal. 31). Dengan demikian, ideologi haruslah dapat merubah realitas kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan yang terkandung dalam ideologi dimaksud.

Manusia sebagai makhluk sosial butuh bermasyarakat. Dalam masyarakat terdapat satuan yang lebih kecil lagi, disebut organisasi. Organisasi ini merupakan bentuk paling ideal dari masyarakat karena pertukaran ide-ide di dalamnya terjadi secara intens, sehingga peluang untuk menghasilkan kebenaran yang lebih baik dari sebelumnya jadi lebih besar. Maka, berorganisasi pun merupakan hakikat kemanusiaan. (Tanja 1991, hal. 16). Dan Zurnali (2010, hal. 24) menyatakan, bahwa perhatian umum dan tujuan kunci dari unit organisasi SDM adalah untuk mencari pengukuran yang dapat mengestimasi secara akurat komitmen para pekerjanya dan mengembangkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan komitmen pada organisasi. Menurut Griffin dalam (Nurdin dan Usman 2004, hal. 78), komitmen organisasi (*organizational commitment*) adalah sikap yang

mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya. Seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi.

Menurut Fred Luthan dalam (Zurnali 2010, hal. 28), komitmen organisasi didefinisikan sebagai; keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi; dan keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Dengan kata lain, ini merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas pada organisasi dan proses berkelanjutan di mana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan.

Dessler (dalam Zurnali 2010, hal. 29) memberikan pedoman khusus yang dapat membantu memecahkan masalah dan meningkatkan komitmen organisasi pada diri anggota: *Pertama* berkomitmen pada nilai manusia; membuat aturan tertulis, memperkerjakan menejer yang baik dan tepat, dan mempertahankan komunikasi. *Kedua*, memperjelas dan mengkomunikasikan misi; memperjelas misi dan ideologi; berkharisma; menggunakan praktik perekrutan berdasarkan nilai; menekankan orientasi berdasarkan nilai dan pelatihan; membentuk tradisi. *Ketiga*, menjamin keadilan organisasi; memiliki prosedur penyampaian keluhan yang komprehensif; menyediakan komunikasi dua arah yang ekstensif. *Keempat*, menciptakan rasa komunitas; membangun homogenitas berdasarkan nilai; keadilan; menekankan kerja sama, saling mendukung, dan kerja tim, berkumpul bersama. *Kelima*, mendukung perkembangan anggota; melakukan aktualisasi; memberikan pekerjaan menantang pada tahun pertama; memajukan dan memberdayakan; mempromosikan dari dalam; menyediakan aktivitas perkembangan; menyediakan keamanan kepada anggota tanpa jaminan.

Mowday et.al., dalam Curtis dan Wright (2001, hal. 37) mengemukakan

komitmen telah didefinisikan sebagai kekuatan identifikasi individu yang berada dalam sebuah organisasi. Lebih lanjut Curtis and Wright (2001, hal. 38) menjelaskan bahwa konsep ini dapat dipecah menjadi tiga komponen, yaitu keinginan memelihara keanggotaan dalam organisasi, keyakinan dan penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi; dan kesediaan bekerja keras sebagai bagian dari organisasi.

Newstrom and Davis mengungkapkan dalam (Zurnali 2010, hal. 31), bahwa komitmen organisasional merupakan tingkat dimana individu memihak dan ingin secara kontinyu berpartisipasi aktif dalam organisasi, yang tercermin melalui karakteristik-karakteristik, yaitu adanya keyakinan yang kuat dan penerimaan atas nilai dan tujuan organisasi, kesediaan untuk mengusahakan yang terbaik bagi organisasi, dan adanya keinginan yang pasti untuk bertahan dalam organisasi.

Dalam kehidupan akademik kontemporer, disiplin-disiplin ilmu mulai dari studi literatur, sampai pada studi fisika, agama, dan etika, menurut Abdullah, semuanya dapat menerima premis yang telah diperjuangkan oleh Karl Manheim yang beranggapan bahwa “seluruh aspek dari keberadaan dan pengetahuan seseorang adalah ditentukan oleh situasinya, pemikiran dan aksi membentuk suatu kesatuan, dan perkembangan intelektual suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan historis yang konkret.” (Abdullah, 2006, hal. 60).

Mengikuti tradisi teori sosial kritis, bahwa ada tiga kepentingan dalam setiap pemikiran, yaitu teori sosial yang berkepentingan teknis, praktis, dan emansipatoris, dengan masing-masing sifat ilmunya yang empiris-analitis, historis-hermeneutis, dan sosial-kritis. (Brian Fay 1984). Tiga bentuk kepentingan Islam-Sosial tersebut muncul sejalan dengan persepsi masing-masing mengenai modernitas. Karena itu dalam soal tersebut, dapat dikatakan bahwa, tiga kepentingan adalah bentuk penerjemahan Islam dalam realitas sosial umat Islam. (Rachman 2004, hal. 355-356).

Menurut Jalaluddin Rahmat, terdapat dua kategori Islam, yakni Islam Konseptual dan Islam Aktual. Kategori Islam Konseptual terdapat dalam al-Qur'an, sunnah Nabi Saw, dan buku-buku atau ceramah-ceramah tentang keislaman. Sedangkan Islam aktual terdapat dalam aktualisasi perilaku pemeluknya. (Rahmat, 1991, hal. 23). Dari sudut pandang ini, menarik kalau kita memperhatikan komentar Ahmad Wahib bahwa, kita orang Islam belum mampu menerjemahkan kebenaran ajaran Islam dalam suatu program pencapaian. Antara *ultimate values* (nilai-nilai terakhir) dalam Islam dengan kondisi sekarang memerlukan penerjemahan-penerjemahan. (Effendi 1981, hal. 18).

Jika Islam konseptual adalah Islam teoritis, maka Islam aktual adalah Islam yang praktis. Dari sudut pandang sosiologi pengetahuan, diketahui bahwa dalam Islam yang teoritis maupun yang praktis itu, termuat berbagai bentuk hubungan teori dan praktik politik. Sebab, Islam yang pada dirinya sendiri, tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Sehingga Islam yang dirumuskan adalah Islam yang ditafsirkan, dan bagaimana seorang menafsirkannya, tergantung dari berbagai kepentingan politis, yang baik disadarinya atau tidak. (Rachman 2004, hal. 355).

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa sebuah pemikiran (Islam) adalah produk sejarah yang di dalamnya berbagai masalah sosial, politik, ekonomi, dan juga kebudayaan ikut memainkan peran. Seluruhnya atau sebagian dari aspek tersebut membentuk suatu situasi duniawi yang di dalamnya "sang pemikir" hidup dan berada. Sementara itu, keyakinan iman seorang pemikir Muslim membentuk situasi lain yang bersifat transendental. Sintesis-dialektik kedua situasi tersebut mempengaruhi bentuk pemikiran Islam. (Mulkan 2003, hal. 204). Dalam bukunya *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*, M. Dawam Rahardjo dalam mengkaji sosiologi cendekiawan Muslim, melihat bahwa secara umum ada empat faktor yang dapat mempengaruhi sikap seseorang terhadap Islam. Satu dari empat faktor tersebut sebagaimana diungkap Dawam Rahardjo adalah, lingkungan organisasi yang menyelenggarakan dakwah



keislaman. Melalui penyebaran ide dan gagasan keagamaan, organisasi semacam ini dapat memasuki dan mempengaruhi kehidupan keagamaan seseorang yang lebih serius. (Rahardjo, 1993, hal. 31).

Pendapat Dawam Rahardjo, ketika dihubungkan dengan HMI, maka selain berstatus sebagai organisasi mahasiswa dan berperan sebagai organisasi perjuangan (AD HMI), di dalamnya juga terdapat misi dakwah Islam. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan tujuan HMI itu sendiri yakni, “Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah *Subhanahu Wata 'ala.*” (AD HMI).

Dari uraian di atas, maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, teori yang dikemukakan oleh Browne, bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. *Kedua*, teori yang dikemukakan oleh Fullan bahwa implementasi merupakan proses untuk melaksanakan ide, program, atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan. Dalam konteks implementasi ini menitikberatkan pada tiga proses; (1) aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide atau gagasan; (2) program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis); (3) kegiatan yang terencana dan dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan kegiatan. *Ketiga*, teori yang dikemukakan oleh Dessler berkenaan dengan pedoman khusus yang dapat membantu memecahkan masalah dan meningkatkan komitmen organisasi pada diri anggota.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan paradigma induktif. Dalam hal ini penulis pilih atas dasar pertimbangan terhadap analisis masalah penelitian yang menuntut sejumlah informasi dari bawah berdasarkan prinsip-prinsip penelitian kualitatif. (Moeloeng 2001, hal. 4-5).

### **Jenis dan Sumber Data**

### *Jenis Data*

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif-kuantitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, data kualitatif merupakan deskripsi yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Moeloeng 2001, hal.3). Di samping itu, data penelitian ini juga merupakan jenis data kuantitatif. Hal ini berkaitan dengan jenis instrumen yang digunakan, yaitu responden dan observasi. Dalam konteks ini, Sudarto (1997, hal. 81) mengatakan “alat pengumpulan data (instrumen) yang digunakan dalam penelitian kuantitatif yang utama adalah daftar pertanyaan...dalam beberapa hal seringkali peneliti menggunakan teknik observasi”.

Meskipun jenis data dalam penelitian ini kualitatif-kuantitatif, namun tetap merupakan penelitian deskriptif. Menurut Arikunto (1998, hal. 245) penelitian deskriptif pada umumnya merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak diperlukan rumusan hipotesis. Penelitian kualitatif-kuantitatif yang digunakan bersifat eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena tertentu. Dengan demikian, yang dimaksudkan penelitian kualitatif-kuantitatif dalam penelitian ini adalah hasil pemahaman terhadap data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan menggunakan jenis instrumen kuantitatif yang bersifat eksploratif dan bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena tertentu. Atas dasar itu, penelitian ini berusaha untuk mengetahui sejauhmana implementasi pemikiran Nurcholis Madjid yang terkandung dalam Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI dalam pembinaan Kader pada HMI Cabang Palembang.

### *Sumber Data*

Untuk mendukung realibilitas penelitian ini, penulis memberdayakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder.

Sumber Data Primer pada penelitian ini adalah data pokok berupa data yang langsung dikumpulkan dari buku-buku atau dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh HMI, seperti *Nilai-Nilai Dasar Perjuangan* (1971), *Kumpulan Materi dan Puisi* (tanpa tahun terbit), dan dari responden yang terdiri dari pembina, pengurus dan anggota kader HMI Cabang Palembang, yang merupakan informasi-informasi yang berkaitan langsung dengan objek kajian, yakni data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber pendukung untuk melengkapi data primer. Yang dijadikan data sekunder dalam penelitian ini seperti buku yang ditulis oleh Victor Immanuel Tanja (1991), *Himpunan Mahasiswa Islam*, buku yang ditulis oleh Suharsono (1997), *HMI; Pemikiran dan Masa Depan*, buku yang ditulis oleh Muhammad Hari Zamhari (2004), *Agama dan Negara; Analisis Kritis Pemikiran Nurcholish Madjid*, dan buku yang ditulis oleh Nurcholish Madjid (1987), *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Selain itu, penulis pun menggunakan sumber-sumber lainnya sepanjang relevan dengan kebutuhan penelitian ini, seperti jurnal ilmiah, majalah, dan informasi-informasi lainnya.

Untuk menentukan sumber-sumber data tersebut dilakukan teknis historis, yaitu heuristik dan verifikatif. Heuristik merupakan langkah awal dalam penelitian sejarah, yaitu mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang terkait dengan data yang diteliti. (Suryata 1997, hal. 65). Untuk mencari data yang terkait dengan penelitian yang berjudul *Implementasi Nilai Dasar Perjuangan dalam Pembinaan Kader; Suatu telaah terhadap Pemikiran Cak Nur pada HMI Cabang Palembang*, maka penulis melakukan pencarian data ke berbagai literatur yang memuat masalah penelitian, seperti Dokumen NDP, Arsip Laporan Pengurus HMI Cabang Palembang, mencari data melalui buku-buku karya Cak Nur atau tentang Cak Nur, melakukan observasi ke Kantor HMI Cabang Palembang dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, serta wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan kader HMI kota Palembang.

Setelah sumber berbagai kategorinya itu terkumpul, maka tahap selanjutnya ini adalah verifikasi atau kritik sumber dalam rangka memperoleh keabsahan sumber data. Dalam hal ini dilakukan uji keabsahan tentang keaslian sumber (otentisitas) yang dilakukan melalui kritik ekstern dan keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik intern. (Abdurrahman 2007, hal. 68).

Kritik ekstern digunakan untuk membuktikan keaslian dan kebenaran dari suatu sumber sejarah, sumber ini asli atau tidak. Kritik ekstern yang peneliti lakukan adalah dengan melihat asal sumber, penulis sumber dan pelaku sejarah. Penulis meneliti sumber tersebut, baik buku, dokumen, maupun arsip tertulis dan diterbitkan oleh pihak-pihak yang dapat dipercaya kebenarannya. Untuk pemilihan *informan*, peneliti mendatangi langsung *informan* yang dapat dipercaya memberi keterangan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

Kritik intern dilakukan setelah melakukan kritik ekstern. Kritik intern bertujuan untuk mencapai nilai pembuktian yang sebenarnya dari isi sumber sejarah, apakah sumber tersebut dapat memberi informasi yang dapat dipercaya. Sedangkan hasil wawancara dikritik dengan cara membandingkan hasil wawancara antar *informan*, sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian tesis ini dilaksanakan pada lingkup organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palembang, yang menyangkut program kerja, aksi atau implementasi dan konsistensi.

### **Responden**

Pemilihan responden dalam penelitian ini difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti. Oleh karena itu, wawancara yang dilakukan kepada beberapa respon (*informan*) harus memiliki beberapa kriteria yang mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Neuman (2003, hal. 394-395) sebagai berikut:

1. The informants is totally familiar with the culture and is in position witness significant makes a good informants.
2. The individual is currently involved in the field
3. The person can speed time with the researcher
4. Non-analytic individual make better informants. A non analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan kader HMI kota Palembang, yang terdiri dari pembina, pengurus, dan anggota kader HMI cabang Palembang. Sebagai sampel penelitian ini akan diambil dari empat angkatan, yaitu angkatan 70, 80, 90, dan 2000.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data terdiri dari; dokumentasi, observasi dan wawancara.

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan klasifikasi bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik yang bersumber dari dokumen maupun buku-buku laporan, koran, majalah dan buku-buku referensi. (Surakhmad 1994, hal. 66). Dapat dijelaskan lebih lanjut, bahwa dokumentasi adalah cara mengumpulkan bukti atau keterangan berupa tulisan atau catatan yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian dengan cara membaca, mencatat, dan mengkategorikan data.

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dan informasi dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis dan rasional mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki. (Arifin 1988, hal. 49). Adapun jenis observasi yang dilakukan adalah observasi partisipasi (*participant observation*), atau pengamatan terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti, dengan ketentuan tidak mengganggu *natural setting* atau keaslian dan kewajaran situasi lapangan. (Usman dan Akbar 2004, hal. 56). Dalam studi keislaman, jika suatu studi berangkat dari fenomena, perilaku empirik sebagai konsekuensi logis pemahaman orang muslim terhadap

kepercayaan normatif-dogmatis, maka antara lain instrumen yang tepat digunakan adalah *participant observation* dengan pendekatan naturalistik-kualitatif. (Abdullah dan Karim 1989, hal. 5).

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur dan tak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah bentuk wawancara yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. Dalam wawancara semi terstruktur, meskipun wawancara sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak menutup kemungkinan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontanitas sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya. Sedangkan di dalam wawancara tak terstruktur, peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tanpa diikat dengan format-format tertentu secara ketat. (Maryeni 2008, hal. 70). Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara tak terstruktur, dimana wawancara ini dilakukan tanpa suatu daftar pertanyaan dengan susunan kata-kata serta tata urut yang tetap, yang harus dipatuhi meskipun tidak memiliki aturan dan cara bertanya tertentu.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. (Annur 2008, hal. 113). Sebagai penelitian lapangan, dan data-data yang diperoleh juga berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan dalam melakukan pengolahan dan analisis data penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif\*. Deskriptif analisis dipergunakan untuk

---

\*Adalah analisis terhadap data-data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dilaksanakan dalam suasana wajar dan alamiah, dalam berbagai konsep dan teori yang dikembangkan berdasarkan kondisi atau kenyataan di lapangan, pada umumnya merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga analisisnya bersifat eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena tertentu secara deduktif. Lihat Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hal. 81-91).

menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki.

Dalam kajian historis, analisis interpretatif diperlukan. Setelah semua data dikritik dalam tahapan kritik sumber data. Maka dalam analisis interpretatif, data-data tersebut dirangkai agar mempunyai bentuk dan struktur. Pada langkah ini penulis menguraikan dan mengembangkan data yang diperoleh kemudian memberikan penafsiran untuk merekonstruksi sejarah, sehingga dapat dimengerti dan dipahami secara jelas. (Panji 2008, hal. 58). Analisis ini dimaksudkan untuk menganalisa secara mendalam sejarah munculnya NDP HMI, gagasan-gagasan dan strategi yang diterapkan HMI dalam pembinaan kader.

Setelah analisis data dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah laporan penelitian. Dalam kajian historis tahap ini dikenal dengan istilah historiografi. Historiografi adalah langkah akhir yang digunakan, yaitu menuliskan hasilnya. (Panji 2008, hal. 59). Tahap ini adalah langkah final dalam penelitian dari rangkaian penelitian yang dilakukan. Sebagai tahap akhir, penulis berusaha menyajikan hasil penelitian sebaik mungkin dalam bentuk sejarah sebagai sebuah peristiwa yang dituangkan dalam penulisan dan disusun berdasarkan kronologi atau peristiwa dan sebab akibat serta kaligasinya. (Abdurrahman 2007, hal. 69).

### **Pendekatan Penelitian**

Untuk memperkuat analisa dalam penelitian ini, maka dipergunakan tiga pendekatan.

*Pertama*, pendekatan kesejarahan (*historis approach*). Pendekatan ini merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. (Gottschalk 1986, hal. 32). Pendekatan ini digunakan sebagai upaya untuk mengkaji ulang peninggalan masa lampau berupa Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI. Dalam hal ini, sejarah dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur yang mendukung lahirnya NDP HMI. Sebagai objek penelitian, NDP HMI akan dijelaskan

berdasarkan fakta-fakta historis yang berhubungan dengan waktu, apakah itu masalah moral, politik, budaya, ideologi, pemikiran, dan sebagainya, dari bentuk yang sederhana hingga bentuk yang lebih kompleks. Pendekatan sejarah ini bertujuan untuk menemukan gejala-gejala NDP HMI dengan menelusuri sumber di masa silam, dengan demikian pendekatan berdasarkan pada personal historis, dalam hal ini Nurcholish Madjid dan perkembangan HMI sebagai organisasi adalah suatu keniscayaan, untuk menemukan sumber-sumber dan jejak perkembangan perilaku keorganisasian sebagai dialog dengan dunia sekitarnya, dan untuk mencari pola-pola interaksi antara NDP HMI dan anggotanya/kadernya. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menyajikan deskripsi detail dan eksplanasi tentang sebab dan akibat suatu kejadian, dalam hal ini NDP HMI, dan pada gilirannya akan membimbing pengembangan teori evolusi organisasi HMI dan perkembangan tipologi kader-kadernya.

*Kedua*, pendekatan sosiologis. Bila pendekatan ini dipergunakan dalam penggambaran tentang peristiwa masa lalu, tentu di dalamnya akan terungkap segi-segi sosial dari peristiwa yang dikaji. Konstruksi sejarah dengan pendekatan sosiologis ini dapat pula dikatakan sebagai sejarah sosial, karena pembahasannya mencakup golongan sosial yang berperan, jenis hubungan sosial, konflik berdasarkan kepentingan, pelapisan sosial, peranan dan status sosial, dan sebagainya. (Abdurrahman 2007, hal. 23). Secara metodologis, penggunaan pendekatan ini dalam kajian sejarah menurut Weber (dalam Abdurrahman 2007, hal. 23), bertujuan memahami arti subjektif dari kelakuan sosial, bukan semata-mata menyelidiki arti objektifnya. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai upaya menjelaskan adanya implementasi Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI terhadap pemahaman dan pembinaan kader HMI cabang Palembang.

*Ketiga*, pendekatan fenomenologis, yakni usaha untuk memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang, biasanya dalam situasi tertentu (Moleong 2002, hal. 9). Dalam konteks penelitian ini, peneliti berusaha untuk masuk ke dalam



dunia konseptual para subyek yang diteliti sedemikian rupa, sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini diharapkan, bahwa implementasi NDP HMI terhadap pembinaan kader HMI cabang Palembang dapat dideskripsikan secara lebih teliti dan mendalam.

### **Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini akan dideskripsikan dalam bentuk laporan hasil penelitian yang dibagi menjadi lima bab. Satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan dan satu bab penutup. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

- Bab 1, Pendahuluan memuat: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Definisi Operasional, Tinjauan Pustaka; Kerangka Teori; Metode Penelitian; dan Sistematika Pembahasan
- Bab 2, Pemikiran Nurcholis Madjid dan Ideologi HMI. Bab ini memuat biografi Nurcholis Madjid, Pemikiran-Pemikiran Nur Cholish Madjid, Sejarah berdirinya HMI, dan Ideologi HMI.
- Bab 3, Profil HMI Cabang Palembang, bab ini memuat HMI di Palembang, Sejarah HMI Cabang Palembang, Status dan Fungsi HMI Cabang Palembang, Tujuan HMI Cabang Palembang, Independensi HMI Cabang Palembang, Struktur Kepengurusan HMI Cabang Palembang, Program Kerja HMI Cabang Palembang.
- Bab 4, Implementasi NDP HMI bagi Kader HMI Cabang Palembang, bab ini memuat Pemikiran Nurcholis Madjid dalam NDP HMI, Aktivitas HMI Cabang Palembang, Pemahaman Kader HMI Cabang Palembang terhadap NDP HMI, Pengaruh Pemikiran Nurcholis Madjid terhadap Kader HMI Cabang Palembang.
- Bab 5, Penutup. Bab ini mencakup simpulan dan saran.

Referensi  
Biodata Penulis  
Lampiran

## Bab 2

### NURCHOLIS MADJID DAN IDEOLOGI HMI

#### Biografi Nurcholis Madjid

##### *a. Riwayat Hidup Nurcholish Madjid*

Nurcholish Madjid yang akrab disapa Cak Nur (Riyana 2003, hal.7) dilahirkan di Jombang, sebuah kabupaten di Jawa Timur, enam tahun menjelang Indonesia merdeka. Tepatnya, ia dilahirkan pada tanggal 17 Maret 1939 M, bertepatan dengan 26 Muharram 1358 H, dari keluarga kalangan pesantren tradisional. Ayahnya bernama H. Abdul Madjid, adalah seorang kyai yang alim hasil godokan Pesantren Tebuireng, dan termasuk dalam keluarga besar Nahdlatul 'Ulama (NU), yang secara personal memiliki hubungan sangat akrab dengan K.H. Hasyim Asy'ary, salah seorang di antara *founding father* (pendiri) Nahdatul 'Ulama (NU). Sementara ibunya, adalah adik dari *rais akbar* NU, dari ayah seorang aktivis Syarikat Dagang Islam (SDI) di Kediri, sewaktu organisasi ini masih banyak dipegang oleh para kiyai. (Riyana 2003, hal. 8-10).

Pendidikan dasar Nurcholish ditempuh di dua sekolah tingkat dasar, yaitu di Madrasah Al-Wathaniyah yang dikelola oleh orang tuanya sendiri dan di Sekolah Rakyat (SR) di Mojoanyar, Jombang pada tahun 1945. Kemudian pada tahun 1952, Nurcholish melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota yang sama. Jadi, sejak di tingkat pendidikan dasar, Nurcholish telah mengenal dua model pendidikan. *Pertama*, pendidikan dengan pola madrasah, yang sarat dengan penggunaan kitab-kitab kuning sebagai bahan rujukannya. *Kedua*, Nurcholish juga memperoleh pendidikan umum secara memadai, sekaligus berkenalan dengan metode pengajaran modern. Pada masa pendidikan dasarnya inilah, khususnya di Madrasah Al-Wathaniyah, Nurcholish sudah menampakkan kecerdasannya dengan berkali-kali menerima penghargaan atas prestasinya. (Nadroh 1999, hal. 22).

Selanjutnya, pada tahun 1955 Nurcholish melanjutkan studinya di Pesantren Darul 'Ulum, Rejoso, Jombang. Tetapi, pendidikan yang ditempuhnya di tempat ini tidak begitu lama, hanya kurang lebih selama dua tahun saja. Dalam sebuah sumber diungkapkan bahwa hal ini nampaknya berkaitan dengan persoalan ayahnya. Ayah Nurcholish, K.H. Abdul Madjid, seorang kyai alumni Pesantren Tebuireng yang didirikan oleh pendiri NU KH. Hasyim Asy'ari yang merupakan kakek dari KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). (Shofyan 2003, hal. 7). Sosok Ayah Nurcholish Madjid sebagai warga NU tetap memegang pilihan politisnya pada Masyumi (sebuah organisasi politik, yang memiliki massa Islam terbesar, pada mulanya juga merupakan pilihan politis warga NU termasuk para tokoh-tokohnya), sementara tokoh-tokoh NU lainnya yang karena satu dan lain hal memilih keluar dari Masyumi. Sikap politik Ayah Nurcholish yang tetap berafiliasi ke Masyumi inilah yang berbeda dengan tokoh-tokoh NU lainnya, membawa dampak kehadiran Nurcholish di pesantren Darul 'Ulum kurang mendapat sambutan hangat. Nurcholish dianggap sebagai anak Masyumi yang kesasar ke kandang NU.

Situasi inilah yang membuat Nurcholish pada tahun 1957, pindah ke pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur (sekitar 120 km dari Jombang), sebuah pesantren yang memberikan nuansa pemikiran reformasi. Sebagaimana diketahui, bahwa pesantren Gontor ini menerapkan semboyan “berpikir bebas setelah berbudi tinggi, berbadan sehat dan berpengetahuan luas”. Sehingga terbentuklah iklim pendidikan yang menawarkan berpikir kritis, tidak berpihak kepada salah satu mazhab secara fanatik dan mengajarkan kehidupan sosial yang relatif modern. (Ensiklopedi Islam 1993, hal. 107). Di samping itu, menekankan kepada santri-santrinya kemampuan berbahasa Arab dan Inggris. Bahkan, bahasa pengantar sehari-harinya pun dalam kedua bahasa tersebut. Di pesantren inilah, Nurcholish masuk ke KMI (*Kulliyat al-Mu'allimin al-Islammiyah*) dan tamat enam tahun kemudian (1960). Setelah

menyelesaikan pendidikan menengah tersebut, Nurcholish masih sempat mengajar di pondok pesantren yang telah membesarkannya, selama kurang lebih satu tahun .

Dengan pendidikan dasar dan menengah yang diterimanya inilah, dapat dilihat bahwa Nurcholish dididik dalam ilmu-ilmu keislaman, ditambah dengan kemampuan berbahasa internasional Arab-Inggris ia dapat mengakses bacaan buku-buku umum yang cukup luas, termasuk kepustakaan asing Arab maupun Inggris dan khazanah kitab-kitab klasik.

Di samping itu, sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Ayah Nurcholish, adalah seorang kiyai dan termasuk di antara tokoh masyarakat sekaligus tokoh NU di daerahnya yang tetap konsisten memegang pilihan politisnya kepada Masyumi. Sangat dimungkinkan sekali ayahandanya Nurcholish berlangganan buletin-buletin dan majalah-majalah yang berisi pemikiran para tokoh-tokoh Masyumi. Dengan demikian, menjadi suatu hal yang sangat mungkin pula Nurcholish telah berkenalan dengan pemikiran-pemikiran para tokoh Masyumi sejak di rumahnya, sekaligus ini akan memberikan manfaat besar dalam pembentukan pemikiran Nurcholish selanjutnya .

Diperkuat lagi, pada tahun 1961 Nurcholish memilih untuk melanjutkan pendidikan tingginya dilakukan di luar Jawa Timur, yakni masuk ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) di Jakarta, sekarang telah berubah status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, dan memilih jurusan yang sangat relevan dengan latar belakang pendidikan yang telah diterimanya. Ia memilih Fakultas Adab jurusan Sastra Arab masyarakat dan Sejarah Pemikiran Islam. Salah satu fakultas yang menghantarkan para mahasiswanya ke khazanah kebudayaan Islam, baik klasik maupun modern. Selanjutnya, Nurcholish berhasil menyelesaikan program sarjana lengkapnya pada tahun 1968, dengan menulis skripsi: *Al-Qur'an, 'Arabiyyun Lughatan Wa'Alamiyyun Ma'nan*, yang maksudnya adalah "Al-Qur'an dilihat secara bahasa bersifat lokal (ditulis dengan menggunakan bahasa Arab), sebab diturunkan di Benua

Arabia. sedangkan dari segi makna mengandung sifat universal, sebab merupakan kitab rahmat bagi seluruh alam semesta. (Shofyan 2003, hal. 14)

Setelah beberapa tahun mengajar di almamaternya, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan bekerja di LEKNAS/LIPI (Lembaga Penelitian Ilmiah Indonesia) sebagai peneliti, Nurcholish tertarik untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, yakni tingkat doktoral dengan mengambil tempat di *Chicago University*, AS antara tahun 1978-1984. Pada permulaan pendidikan doktoralnya, ia pernah mencoba mengambil studi Sosiologi, namun karena ada ketidaksesuaian ia berpindah ke bidang filsafat pada Jurusan Studi Keislaman. Pendidikan doktoralnya dilewatkan selama enam tahun, dengan menulis disertasi yang berjudul *Ibn Taimiya On Kalam and Falsafah Problem of Reason and Revelation in Islam*. (Handrianto 2007, hal. 63).

Di kalangan intelektual, sosok Nurcholish Madjid (Cak Nur) lebih dikenal sebagai cendekiawan atau guru. Predikat guru ternyata tidak cukup sebagai label untuk mewakili sosok Nurcholish Madjid. (Riyana 2003, hal. 7).

Nurcholish sejak 1970-an telah aktif meletakkan “rel” untuk mengarahkan laju “gerbong” besar bernama Indonesia. Di antaranya melalui sumbangan pemikirannya tentang pembaharuan Islam, demokrasi, pluralisme, humanisme, dan negara bangsa menjadi bahan perbincangan yang luas di kalangan aktivis Islam dan pemerhati politik Indonesia. Misalnya jargon politik “Islam yes, Partai Islam no?”. (Riyana 2003, hal. 8).

Pernyataan Nurcholish ini terkait erat dengan kondisi menjelang pemilu tahun 1971. Ketika itu partai-partai Islam mengalami kemunduran. Klaim “mewakili umat” sama sekali tidak tercermin dalam tindakan, komunikasi politik yang cenderung “menjual ayat”, serta diperburuk dengan dugaan meluasnya praktik korupsi. Partai Islam menjadi tidak otentik, karena tidak satunya kata dengan perbuatan. Singkat kata, pernyataan tersebut adalah kritik terhadap partai-partai Islam pada waktu itu. Nurcholish sama sekali tidak anti partai Islam. Bahkan pada tahun 1977 setelah tidak lagi terikat

dengan HMI, Cak Nur sempat berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang notabene merupakan partai berbasis Islam. Cak Nur memberikan pengibaratan keterlibatannya dengan PPP sebagai upaya untuk “memompa ban kempes”.

Ketika itu dua partai politik yang ada (PPP dan Partai Demokrasi Indonesia) tak mampu menandingi dominasi Golkar. Akibatnya proses *check and balance* dalam mekanisme demokrasi di tanah air bisa terancam.

Pilihan Cak Nur untuk mendukung PPP juga menuai kritik, terutama dari teman-teman sebayanya dari kalangan aktivis elit mahasiswa. Namun, Nurcholish melakukannya dalam kerangka membangun perimbangan politik, yang merupakan salah satu syarat demokrasi. (Riyana 2003, hal. 8). Demikianlah aktivitas Cak Nur dari tahun 1977-2005. Nurcholish Madjid wafat pada hari senin, tanggal 29 agustus 2005. pukul 14.05 WIB di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI), Jakarta Selatan. (Handrianto 2007, hal. 73). Dan Ia di makamkan di taman makam pahlawan Kalibata.

#### *b. Aktivitas dan Kegiatan Intelektual Nurcholish Madjid*

Selain Aktif di bangku kuliah, Nurcholish juga terlibat aktif dalam kegiatan organisasi di luar kampus. Ia menambah pengalaman organisasinya sekaligus berpartisipasi dalam sebuah organisasi mahasiswa Islam yang cukup solid pada waktu itu, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ia mulai memasuki organisasi HMI pada tahun 1963, kira-kira setelah empat semester dalam masa perkuliahannya. Dimulai di tingkat cabang, Nurcholish telah menunjukkan kehebatannya sebagai seorang pemimpin, yang tidak saja dikagumi oleh kawan-kawannya sekaligus juga disegani oleh rival-rivalnya. Karir organisasinya semakin diperhitungkan, ketika di penghujung tahun 1966 HMI melakukan kongres di kota Solo, Nurcholish sebagai ketua umum cabang pinggiran (Ciputat) menjadi calon kuat ketua umum Pengurus Besar (PB HMI). Dan karena citra kepemimpinannya yang menonjol sekaligus personalitasnya yang menarik ia terpilih

menjadi ketua PB HMI. Bahkan Nurcholish terpilih menjadi ketua umum PB HMI selama dua periode berturut-turut (1966-1969 dan 1969-1971). (Rosita 1997, hal. 175). Selanjutnya, ia juga banyak menempati formasi penting di organisasi-organisasi kemahasiswaan dunia. Antara lain, ia pernah menduduki jabatan Presiden PEMIAT (Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara, 1967-1969 ). Juga, menjadi wakil sekjen IIFSO (*International Islamic Federation of Student Organization*, 1969-1971). (Rosita 1997, hal. 176).

Selanjutnya, menjadi pemimpin umum majalah *Mimbar Jakarta* (1973-1976 ), sebuah majalah yang membahas tentang politik. Kemudian bersama teman-temannya mendirikan sekaligus menjadi Direktur LSIK (Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan) 1972-1976 dan LKIS (Lembaga Kebijakan Islam Sanudi) 1969-1974.

Nurcholish, juga dikenal sebagai seorang pendiri Yayasan Wakaf Paramadina. Sebuah yayasan yang dikenal tempat orang-orang menengah kota berdiskusi masalah-masalah keagamaan. Di Paramadina inilah, pemikiran-pemikiran Nurcholish menemukan tempat sosialisasinya. Sehingga forum kuliah di Paramadina dikenal orang memiliki nuansa iklim yang demokratis, kritis dan analitis, sekaligus mengakrabkan diri dengan persoalan-persoalan substansial. Melalui Paramadina inilah Nurcholish membangun cita-cita untuk menciptakan suatu tatanan 'masyarakat madani'. (Rosita 1997, hal. 178).

Ia juga merupakan salah seorang anggota Komnas HAM, tepatnya sebagai wakil ketua sub-komisi penyuluhan dan pendidikan komnas HAM Indonesia. Ia juga pernah menjadi dewan penasehat Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Beliau juga sebagai salah seorang tokoh nasional yang duduk di Tim 11 (sebelas), Tim yang dibentuk dalam rangka menyeleksi partai-partai yang "layak" ikut dalam pemilu Juni 1999. di dunia akademis ia juga pernah menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina Mulya, yang didirikan pada tahun 1996 dan di bawah naungan Yayasan Paramadina.



(Rosita 1997, hal. 178-179).

Pada masa aktif di organisasi-organisasi, khususnya di HMI, aktivitas intelektual Nurcholish Madjid menunjukkan perkembangan yang pesat, yang mana ia banyak berhadapan dengan realitas yang mendorongnya ikut aktif memikirkan solusi tentang persoalan-persoalan yang dihadapi negara dan bangsa sekaligus agamanya.

Sumbangsih Nurcholish Madjid dalam membangun “rel” demokrasi Indonesia tidak sekedar dalam bentuk pemikiran atau wacana. Tapi juga keterlibatan langsung dalam urusan politik di tanah air. Bakat pemikiran dan kepemimpinan politik Nurcholish makin terasa ketika menjadi ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) selama dua periode berturut-turut (1966-1969 dan 1969-1971). Sebagai tokoh muda pada masa awal Orde Baru, Nurcholish Madjid justru meminta para mahasiswa untuk tidak memilih partai Golkar dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 1977. Golkar di mata Nurcholish Madjid telah memiliki mesin politik berupa: militer, birokrasi dan uang.

Pada tahun 1977 juga, Nurcholish Madjid turut berperan aktif dalam mendorong terbentuknya wadah para cendekiawan muslim. Kurang lebih selama lima tahun (1990-1995) ia memangku jabatan wakil ketua dewan penasehat ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).

Pada kurun waktu yang sama pula, Nurcholish Madjid menjadi anggota Dewan Pers Nasional (1990-1996) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (1993). Keterlibatannya dalam membangun “rel” demokrasi Indonesia dan politik nasional terus bergulir hingga akhir 1990-an. Sejarah mencatat sumbangsih Nurcholish Madjid di akhir pemerintahan Soeharto, pada Mei 1998, ketika menyarankan orang kuat Orde Baru ini untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia.

Nurcholish Madjid juga menolak tawaran Soeharto untuk masuk dalam komite reformasi atau kabinet. “Kami tidak ingin dituduh macam-macam oleh rakyat,”

jawabnya tegas pada Soeharto. Seusai Soeharto mundur atau lengser, Nurcholish Madjid getol mendorong berlangsungnya Pemilu. Menjelang Pemilihan Umum 1999 Nurcholish Madjid bahkan bersedia menjabat sebagai Ketua Tim Sebelas yang bertugas untuk memverifikasi partai politik yang akan mengikuti pemilu. (Rosita 1997, hal. 179).

Di tengah arus besar perubahan politik nasional ini peluang Nurcholish Madjid untuk duduk di pemerintahan kembali muncul. Sejumlah tokoh politik sempat mengusulkan agar cendekiawan dari Mojoanyer Jombang ini bersedia menjadi Presiden Indonesia. Ia menapik tawaran itu, karena menilai dirinya bukan orang partai politik yang mengikuti pemilihan umum. “Apalagi Gus Dur (Abdurrahman Wahid) mencalonkan diri. Saya menjadi makmum saja. Tidak mungkin harus ada dua imam”, katanya. (Rosita 1997, hal. 179).

Jawaban Nurcholish Madjid tak lebih bagian dari komitmennya untuk patuh pada “rel” demokrasi yang telah dibangunnya sejak awal 1970-an. Kendati mengaku sebagai “makmum,” Cak Nur tak berhenti mengkritik Presiden Abdurrahman Wahid pada waktu itu. (Rosita 1997, hal. 179-180).

Sikap serupa juga mengemuka dari Nurcholish Madjid dalam mencermati jalannya pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Apalagi ketika Nurcholish Madjid melihat bangsa Indonesia belum kunjung keluar dari krisis ekonomi dan politik. Korupsi dan penegakan pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governmance*) menjadi salah satu titik perhatiannya. (Rosita 1997, hal. 180).

Nurcholish Madjid memandang dirinya tak bisa berpangku tangan lagi dalam melihat ancaman terhadap proses demokrasi di tanah air. “Demokrasi di Indonesia mengalami *gridlocked* (jalan buntu), Ujar Nurcholish Madjid”. Kegelisahan ini yang turut mendorong munculnya semangat Nurcholish Madjid untuk bersedia di calonkan sebagai presiden pada Pemilihan Umum tahun 1999 dan menggulirkan sepuluh *platform* sebagai pedoman membangun kembali Indonesia. (Madjid 2004, hal. 114-171).

Di mata Nurcholish Madjid membangun Indonesia kembali harus dimulai sekarang. Berikut ini cuplikan penjelasannya kepada sejumlah tokoh politik dan wartawan di Jakarta pada 1 Juli 2003:

“Lima tahun era reformasi berjalan, tak banyak muncul solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa. Reformasi yang diharapkan menggerakkan kehidupan bangsa menuju keadaan lebih baik justru bergerak lambat, jika tak mau dibilang mandeg. Dalam beberapa hal misalnya perekonomian kehidupan rakyat justru memburuk. Kini Indonesia berada pada suatu titik krusial di mana pilihan rakyat hari ini akan sangat menentukan masa depan, apakah akan sesuai dengan cita-cita pendirian bangsa ini, yakni tercapainya suatu masyarakat adil dan makmur. Atau malah menyimpang jauh dari tujuan semula”. (Riyana 2003, hal. 6).

Lalu Nur Cholish Madjid juga menjelaskan:

“Melalui kesediaan saya dicalonkan sebagai presiden RI 2004 dengan membawa sepuluh *platform* untuk membangun kembali Indonesia, saya mengajak bangsa Indonesia bersama-sama menanam kembali bibit-bibit pikiran terbaik tentang bangsa dan negara ini, seperti dulu berhasil dilakukan para bapak pendiri bangsa. Proses menanam tentu mengandung dimensi waktu. Tak ada tanaman berbuah seketika ditanam. Karena itu, saya mengajak bangsa Indonesia melihat ke depan dengan keyakinan bahwa kesusahan dan kerja keras hari ini akan membuahkan hasil untuk menikmati generasi mendatang, anak dan cucu kita. Jika tak ada orang menanam pohon kelapa hari ini, tak akan ada orang memakan kelapa lima tahun mendatang. (Riyana 2003, hal. 7).

Sepuluh *platform* membangun kembali Indonesia yang ditawarkan oleh Nurcholish Madjid sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua lapisan pengelola negara.
2. Menegakkan supremasi hukum dengan konsisten dan konsekwen.
3. Melaksanakan rekonsiliasi nasional dengan:
  - a. Menarik pelajaran pahit dari masa lalu dengan tekad tidak mengulanginya.
  - b. Menatap masa depan dengan pendamaian dan menyatukan seluruh kekuatan bangsa.
4. Merintis reformasi ekonomi dengan mengutamakan pengembangan kegiatan produktif dari bawah.
5. Mengembangkan dan memperkuat pranata-pranata demokrasi: Kebebasan sipil (khususnya kebebasan pers dan akademik) serta pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara pemerintah, perwakilan dan pengadilan.
6. Meningkatkan ketahanan dan keamanan nasional dengan membangun harkat dan martabat personel dan pranata TNI dan Polri dalam bingkai demokrasi.

7. Memelihara keutuhan wilayah negara melalui pendekatan budaya, peneguhan kebhinekaan dan keekaan, serta pembangunan otonomisasi.
8. Meratakan dan meningkatkan mutu pendidikan nasional.
9. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan bernegara.
10. Mengambil peran aktif dalam usaha bersama menciptakan perdamaian. (Riyana 2003, hal. 11-12).

Meskipun Nurcholish Madjid tidak masuk dalam daftar nama pencalonan bakal calon presiden dari konferensi partai Golkar pada 10 Februari 2004. Namun Nurcholish Madjid setidaknya telah ikut andil dalam mewarnai Pemilu secara langsung 2004 yang pertama kali dilaksanakan dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia. *Platform* yang telah dirumuskan oleh Nurcholish Madjid tersebut tetap akan diperjuangkannya selaku pendiri dan pengelola Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia (PMKI). (Riyana 2003, hal. 8).

Di dunia yang akademis, jika seorang profesor disebut “ensiklopedis”, maka itu tentu seorang guru besar yang pengetahuannya amat luas, bisa mengaitkan keahliannya dengan berbagai disiplin keilmuan mutakhir. (Riyana 2003, hal. 8).

### *c. Karya-karya Nurcholish Madjid*

Nurcholish dapat digolongkan sebagai seorang cendekiawan yang produktif. Dalam perjalanan hidupnya selama 66 tahun, sudah banyak karya-karya ilmiah baik berupa artikel, makalah maupun artikel/makalah yang dibukukan, dan lain-lain. Karyanya yang kini telah beredar dalam bentuk buku yang sudah tersebar di Indonesia di antaranya dapat di sebutkan berikut ini :

1. *Khazanah Intelektual Islam* (Editor, 1984). Karya ini menurut penulisnya dimaksudkan untuk memperkenalkan salah satu segi kejayaan Islam di bidang pemikiran, khususnya yang berkenaan dengan filsafat dan teologi. Ia memperkenalkan sarjana-sarjana Muslim Klasik, antra lain Al-Kindi, Al-‘Asy’ary, Al-Farabi, Ibnu Sina’, Al-Ghazali, Ibnu Rusyd, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun, Al-Afgani dan Muhammad Abduh. Sebagai mana diakui oleh Nurcholish Madjid sendiri. Buku ini merupakan sekedar pengantar pemikiran kepada kajian yang lebih luas dan mendalam tentang khazanah kekayaan

pemikiran Islam. Meskipun hanya sebuah pengantar, tetapi ini merupakan sumbangsih berharga, khususnya terhadap literatur-literatur pemikiran Islam yang berbahasa Indonesia.

2. *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan* (1987). Buku ini sampai dengan tahun 1994 telah dicetak ulang sebanyak enam kali. Di dalamnya merupakan kumpulan-kumpulan tulisan Nurcholish, yang menurutnya dikerjakan dalam “rentan waktu dua dasawarsa” sebagai respon terhadap beberapa persoalan dan isu-isu berkembang pada saat itu. Di bawah prinsip “untuk mencari dan terus mencari kebenaran, secara tiada berkeputusan. Dan berkeyakinan bahwa Tuhanlah kebenaran dan bahwa hanya Dia-lah kebenaran mutlak, Nurcholish melontarkan gagasan-gagasan disekitar kemoderenan, keislaman dan keindonesiaan.
3. *Islam, Kerakyatan dan keIndonesiaan: Pikiran-Pikiran Nurcholish “Muda”* (1994). Sebagaimana dalam bukunya *Islam kemoderenan dan keindonesiaam*, dalam buku ini Nurcholish berbicara mengenai keislaman, keindonesiaan dan kemoderenan, dengan penekanan bagaimana menciptakan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan prinsip-prinsip tauhid.
4. *Pintu-Pintu Ijtihad* (1994). Buku ini sebenarnya merupakan kumpulan sebagian besar tulisan Nurcholish pada kolom *Pelita Hati* di *Harian Pelita* (1981-1991) dan *Tempo*.
5. *Masyarakat Religius* (1997). Buku yang terdiri dari lima bab ini mengetengahkan tentang Islam dan konsep kemasyarakatan, komitmen pribadi dan sosial, konsep keluarga muslim, prinsip medis dan kesehatan keluarga muslim serta konsep mengenali eskatologis dan kekuatan supra alami.
6. *Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan* (1997). Buku ini merupakan seleksi makalah-makalah Nurcholish sekitas dua puluh lima tahun yang lalu.

Buku ini memuat deskripsi dunia pesantren dengan segala dinamika perkembangannya, berhadapan dengan wacana modernisasi.

7. *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi* (1999). Buku ini dapat dikatakan merupakan perjalanan panjang pandangan sosial politik Nurcholish, dalam wacana perpolitikan di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh pemberi kata pengantar apa yang ada dalam buku ini dapat memberikan menyarikan pemikiran-pemikiran yang selama ini ini digeluti Nurcholish, yakni bahwa semua gagasan yang pernah dilontarkannya dalam berbagai bidang merupakan transformasi nilai-nilai Al-Qur'an, dalam mewujudkan masyarakat madani.

Adapun yang berupa karya tulis, disertasi dan artikel-artikel baik yang berbahasa Arab, Inggris ataupun Indonesia, antara lain:

1. *Al-Qur'an 'arabiyyun Lughatan wa 'Alamiyu-un Ma'nan* (1968). Merupakan karya skripsi sarjananya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam karya tulis ini Nurcholish membahas al-Qur'an dilihat dari segi bahasa bersifat lokal karena menggunakan bahasa Arab, sebab diturunkan di benua Arabia. Tetapi dari segi makna al-Qur'an memiliki kandungan pengertian universal, sebab ia merupakan kitab rahmat bagi seluruh alam semesta. Belum diterbitkan.
2. *Ibnu Taimiyah On Kalam and Falsafah: Problem of Reason and Revelation In Islam, 1984*. Karya ini merupakan disertasi doktoralnya di Chicago University, AS, yang mengetengahkan tentang kajian kalam dan filsafat, sampai sekarang belum diterbitkan.
3. "Pesantren dan Tasawuf", dalam M. Dawam Raharjo (ed), *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3IS, Cet. Ke-2, 1993. Dalam tulisan ini Nurcholish menjelaskan mengenai akar-akar sejarah pertumbuhan tasawuf, sekaligus juga menyinggung secara singkat hubungan antara tasawuf dengan cabang-cabang keilmuan Islam lainnya, yaitu Ilmu Kalan dan Fiqih.

4. *“Islam in Indonesia: Challenges and Opportunities”*, dalam Cyriac K. Pullaphilly (ed).
5. *“Islam in The Contemporary World”* (Notre Dame, Indiana: Cros Road Books, 1980).

Melihat begitu banyaknya karya-karya ilmiah yang dihasilkan oleh Nurcholish sebagaimana yang sebagiannya berhasil dihimpun, menunjukkan suatu kenyataan bahwa Nurcholish merupakan seorang intelektual Muslim yang produktif. Pemikirannya dalam berbagai bidang telah diakui, khususnya dalam wacana pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Lebih dari itu, pemikiran-pemikirannya, baik yang dituangkan dalam buku, artikel, makalah ataupun ceramah-ceramahnya dalam berbagai kesempatan, senantiasa menarik untuk didiskusikan, bahkan, tak jarang menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Inilah kemudian yang membedakan sosok Nurcholish begitu berbeda dengan sosok-sosok intelektual Muslim lainnya. ( Nadroh 1997, hal. 48).

### **Pemikiran-Pemikiran Nurcholis Madjid**

Dinamika Pemikiran Nurcholish Madjid telah digulirkannya sejak ia masih menjadi mahasiswa di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebagai seorang yang dikenal cerdas Nurcholish Madjid terlibat di berbagai organisasi kemahasiswaan. Aktivitasnya di organisasi ternyata memberikan ruang-ruang bagi Nurcholish Madjid untuk ikut secara aktif menyikapi persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat.

Seperti diketahui bahwa Nurcholish Madjid pernah memimpin organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) sebuah organisasi mahasiswa tertua dan memiliki basis anggota terbesar di Indonesia, dimana hingga saat ini, hanya Nurcholish Madjid lah satu-satunya ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) yang pernah dipercaya mengemban amanah tersebut selama dua periode, tahun 1959-1966

dan 1969-1971. (Rosita 1997, hal. 175), di HMI inilah kemudian buah pemikiran Nurcholish Madjid sangat maju ini terbukti dengan menghimpun pemikirannya dalam "Nilai-Nilai Dasar Perjuangan" (NDP).

NDP merupakan nilai dasar yang dipakai sebagai alat melakukan peranan HMI sebagai organisasi perjuangan, dimana di dalamnya berisi rumusan tentang ajaran-ajaran pokok agama Islam yaitu nilai-nilai dasarnya, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist dan memiliki pembahasan secara substansial yaitu dasar dasar kepercayaan, kemanusiaan, kemerdekaan manusia, ikhtiar dan takdir, ketuhanan yang maha esa dan perikemanusiaan, lalu individu dan masyarakat, keadilan sosial, keadilan ekonomi dan kemanusiaan serta ilmu pengetahuan. (Hasil Kongres HMI XXIV 2003, hal. 100).

Selama lebih kurang 38 tahun sejak ditetapkan di Kongres HMI IX Malang 1969 NDP belum pernah mengalami perubahan, hanya pada kongres HMI ke-XXV di Makasar 2006 NDP sedikit mengalami perubahan namun tetap memiliki substansi yang sama, dimana rumusannya itu berisi Landasan dan kerangka berfikir, dasar dasar kepercayaan, hakekat penciptaan dan eskatologi (*ma'ad*), manusia dan nilai nilai kemanusiaan, kemerdekaan manusia dan keniscayaan universal, individu dan masyarakat, keadilan sosial dan keadilan ekonomi, dan sains Islam. (Hasil Kongres XXV 2006, hal. 113-131).

Yang terpenting adalah bahwa Perumusan Nilai Dasar Perjuangan (NDP) oleh Nurcholish Madjid sebagai sumber nilai dan pegangan ideologi HMI dirumuskan dengan mendialogkan pandangan dunia Barat (*western world view*) dengan pandangan dunia Islam (*Islamic world view*). (Mukhtar 2006, hal. 124).

Lahirnya pemikiran pemikiran Nurcholish Madjid sebetulnya tidak terlepas dari kondisi umat Islam Indonesia ketika itu yang tengah mengalami kejumudan kembali dalam pemikiran dan pengembangan ajaran ajaran Islam. Jika dianalisa tulisan-tulisan



Nurcholish Madjid yang berkembang mulai era tujuh-puluhan sampai ia wafat, nampak sekali konsistensi pemikirannya. Konsistensi ini dapat pula dilihat sebagai suatu generalisasi pemikiran hingga munculnya ide dan gagasan masyarakat madani.

Kata *madani* secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang artinya negeri, kota, penduduk, perkotaan atau orang-orang sipil. (Yunus 1992, hal. 414). Dalam pemahaman pada umumnya, bahwa yang dimaksud dengan masyarakat kota adalah suatu simbol atau lambang dari kemajuan suatu bangsa.

Istilah masyarakat madani untuk pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Anwar Ibrahim dalam ceramah pada forum Istiqlal pada 26 September 1995. Istilah tersebut oleh Anwar Ibrahim dikaitkan dengan konsep kota peradaban, atau masyarakat perkotaan yang telah tersentuh peradaban maju. (Culla 1999, hal. 7). Sedangkan di Indonesia masyarakat madani dikenalkan dan dipopulerkan oleh Nurcholish Madjid melalui yayasan Paramadina yang pernah dipimpinnya, perkembangan selanjutnya ternyata ungkapan tersebut diterima oleh para cendekiawan muslim Indonesia sebagai terjemahan dari istilah *civil society*. (Efendy dan Zada 1999, hal. viii). Istilah masyarakat madani sebenarnya merujuk pada masyarakat Islam yang dibangun Nabi Muhammad di negeri Madinah. Perkataan *Madinah* dalam bahasa Arab dapat dipahami mengandung dua pengertian. *Pertama*, secara konvensional kata *madinah* berarti kota. *Kedua*, secara bahasa kata *madinah* berarti beradab. (Culla 1999, hal. 192-193).

Masyarakat madani dalam Islam ditemukan dalam ajaran Rasulullah SAW. Nabi Muhammad Saw memberikan teladan kepada umat manusia ke arah pembentukan umat beradab. Sebutan masyarakat madani diambil dari kata *madaniyah* yang berarti peradaban. Dengan demikian yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab. (Culla 1999, hal. 192-193).

Istilah masyarakat madani dipandang baru oleh para pengamat sosial politik. Istilah tersebut merupakan padanan atau persamaan dari istilah *civil society* yang

sebelumnya telah berkembang di Barat. Sebelum istilah masyarakat madani muncul, sudah ada terlebih dahulu diperkenalkan istilah masyarakat sipil, masyarakat warga atau masyarakat kewarganegaraan sebagai terjemahan dari istilah *civil society*. Tapi nampaknya terjemahan-terjemahan tersebut dipandang oleh para pengamat kurang tepat untuk diterapkan dengan istilah aslinya. Apalagi jika dikaitkan dengan istilah masyarakat militer sebagai lawan dari istilah masyarakat sipil. Karena itulah tepat kiranya jika ditawarkan istilah masyarakat madani sebagai terjemahan dari istilah *civil society*. (Culla 1999, hal. vi).

Dari sudut peralihan istilah, maka sebutan masyarakat madani jelas mempunyai kedekatan dengan istilah asalnya, yakni *civil society*. Oleh karena itu masyarakat madani adalah sejajar atau setara dengan istilah *civil society*, meskipun kedua istilah tersebut memiliki latar belakang historis yang berbeda. Di satu sisi *civil society* memiliki keterkaitan erat dengan Barat, sedangkan sisi lainnya masyarakat madani memiliki keterkaitan dengan historis Islam di masa Nabi Muhammad Saw. Akan tetapi walaupun konteks sejarah lahirnya berbeda, tetapi keduanya memiliki persamaan secara prinsipil, yakni nilai-nilai kesetaraan, keadilan, partisipasi, toleransi, dan supremasi hukum sebagai prinsip dasar dalam komunitas yang beradab.

Selain istilah *civil society* ada juga istilah *civilized society* (masyarakat beradab). Sebagaimana yang dikemukakan Nurcholish Madjid bahwa masyarakat madani diasosiasikan dengan “masyarakat beradab” atau “berperadaban”. Dengan demikian pengertian masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab (*civilized*). (Sanaky 2003, hal. 31).

Konsep besar gagasan masyarakat madani sebenarnya tidak bisa terlepas dari sebuah sintesa yang menemukan dua titik persamaan antara Barat dan Timur. Konsep ini adalah gagasan dari Nurcholish Madjid, tokoh yang mempopulerkan masyarakat madani di Indonesia, konsep ini juga lebih dikenal dengan konsep jalan tengah.

Dalam merumuskan pembicaraan mengenai masyarakat madani Nurcholish Madjid paling tidak menggunakan tiga term yakni *demokrasi*, *masyarakat madani* “*civil society*” dan *civility* sebagai satu kesatuan. Menurutnya jika demokrasi sebagaimana dipahami di negara maju harus mempunyai “rumah” maka rumahnya adalah masyarakat madani (*civil society*), sedangkan *civility* merupakan kualitas etik yang dimiliki oleh masyarakat seperti toleransi, keterbukaan dan kebebasan yang bertanggung jawab. (Madjid 1999, hal. 144-149).

Nurcholish Madjid berpendapat bahwa masyarakat madani sangat ditentukan oleh sejauh mana kualitas *civility* tersebut dimiliki warganya. *Civility* mengandung pengertian toleransi yang berarti kesediaan pribadi pribadi untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan tingkah laku sosial, juga kesediaan untuk menerima pandangan bahwa tidak selalu ada jawaban yang benar atas suatu masalah.

Menurut pandangan Nurcholish Madjid juga bahwa masyarakat madani adalah suatu bentuk masyarakat yang memberikan satu isyarat tentang apa yang disebut dengan kebersamaan. Masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya, dimana hak azazi masyarakat sebagai warga negara yang mendapat pengakuan oleh negara dan juga sebaliknya bahwa setiap warga negara dituntut untuk memenuhi kewajibannya kepada negara. (Yasmadi 2005, hal. 15-16). Inilah barangkali demokratisnya suatu masyarakat madani bagi Nurcholish Madjid, sebab diberbagai negara yang memberlakukan sistem pemerintahan otokratis cenderung meremehkan hak-hak warganya, padahal realitas hidup bersama dalam kemajemukan harus dipahami sebagai suatu rahmat. Maka sebetulnya bentuk dari masyarakat madani bisa diidentifikasi melalui beberapa indikator di antaranya adalah melalui azaz nilai, yang merupakan ciri khususnya seperti pluralisme, toleransi, akhlak (etika dan moral), tertib hukum, dan keadilan.

Dalam pengertian lain disebutkan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan secara universal, tanpa

memandang asal-usul maupun perbedaan agama dan suku bangsa, masyarakat yang mencintai prinsip-prinsip musyawarah (*demokratisasi*), keadilan (*egalitarianisme*), dan keterbukaan (*inklusivisme*) dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, masyarakat yang merdeka (*independent*) dan bebas (*freedom*). (Effendi 2002, hal. xxix).

Karakter masyarakat yang memiliki dimensi-dimensi nilai di atas telah diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW lebih kurang 14 Abad yang lalu. Dengan kata lain, melalui keteladanan, Nabi telah berhasil mewujudkan sebuah masyarakat egaliter, partisipatif, gambaran masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis. (Madjid 1992, hal. 114). Nabi Muhammad SAW telah merintis dan memberikan teladan kepada ummat manusia dalam membangun masyarakat madani (masyarakat beradab) dengan mereformasi sosio-kultural masyarakat Yastrib yang kering dari nilai-nilai etika, dan tidak mengindahkan hak-hak azasi perorangan dengan tatanan masyarakat yang kacau. Perubahan mendasar yang dipelopori oleh Muhammad ini, mengantarkan masyarakat Yastrib kepada suatu tatanan masyarakat beradab (*madaniyah*), masyarakat yang tunduk dan patuh kepada agama (*din*) dan dinyatakan dalam supremasi hukum dan peraturan. Usaha Nabi itu disebut juga dengan proses pembinaan kesadaran dan pencerahan dengan mencari dan mengaktualkan kembali petunjuk Allah, sehingga mentransformasikan masyarakat Arab menjadi masyarakat madani. Proses ini dapat dikatakan sebagai proses yang relatif panjang, sebab lebih kurang dua puluh tiga tahun lamanya Nabi berjuang itu.

Selanjutnya nama Yastrib dirubah Nabi menjadi *Madinah*. Perubahan nama ini dipahami sebagai sebuah manifesto konseptual mengenai upaya Nabi untuk mewujudkan sebuah masyarakat madani, dihadapan masyarakat baduwi atau nomad. Nabi mengubah nama Yastrib menjadi Madinah, pada hakikatnya merupakan sebuah pernyataan niat, sikap, proklamasi atau deklarasi, bahwa tempat baru itu, Nabi bersama

para pendukungnya yang terdiri dari kaum anshor dan muhajirin hendak mendirikan dan membangun suatu masyarakat yang beradab. (Hidayat 2003, hal. 31).

Menurut Nurcholish Madjid secara konvensional perkataan madinah memang diartikan dengan “kota”, tetapi menurut ilmu kebahasaan perkataan madinah mengandung makna “peradaban”. Dalam bahasa Arab, “peradaban” dinyatakan dalam kata kata “*Madaniyah*” atau “*Tamaddun*”. Oleh karena itu masyarakat madani diasosiasikan dengan “masyarakat beradab” atau “berperadaban”. Dengan demikian pengertian masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab (*civilized*) yang membangun kehidupan sosial yang sopan, yang ditegakan atas dasar akarnya hak, atas dasar kewajiban dan kesadaran umum untuk patuh kepada peraturan atau hukum. Oleh karena itu, masyarakat dengan tipologi seperti inilah yang dibangun nabi di Madinah. (Madjid 2003, hal. 31). Inilah di antara beberapa sifat yang dimiliki masyarakat madinah ketika berada di bawah pimpinan Nabi Muhammad yang tunduk dan taat pada konstitusi yang diciptakan bersama.

Untuk membangun sebuah masyarakat madani Nurcholish Madjid paling tidak memberikan gambaran mengenai pondasi dasar agar perwujudan masyarakat madani dapat terlaksana. Dalam hal ini ia menempatkan azas sebagai landasan pembentukan masyarakat madani, diantaranya adalah:

#### 1. Pluralisme

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kemajemukan budaya dalam paradigma sejarah Nabi Muhammad SAW telah membentuk suatu keharmonisan suatu masyarakat yang plural. Sebab, pluralisme ketika itu tidak hanya dipahami sebatas perbedaan budaya, agama, ras, etnis dan lain-lain. Lebih dari itu sesungguhnya pluralisme benar-benar menjadi suatu yang bernilai positif, sehingga muncul kesadaran hidup dengan visi kebersamaan dalam kemajemukan untuk memperjuangkan dan mempertahankan kota Madinah dan Nabi Muhammad dari berbagai bentuk perlawanan kaum kafir. Azas-azas

pluralisme telah menghantarkan masyarakat Yastrib kepada madaniyah (peradaban). (Madjid 2003, hal. 31-32).

Istilah pluralisme sesungguhnya sudah menjadi gejala umum, namun ada indikasi, kita memahami pluralisme hanya sepintas lalu, tanpa makna yang lebih mendalam dan tidak berakar dalam ajaran kebenaran. Menurut Nurcholish Madjid, faham kemajemukan masyarakat atau pluralisme tidak cukup hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan kemajemukan itu sebagai nilai positif yang merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Memaknai dan memahami pluralisme pada gilirannya menumbuhkan pluralisme yaitu sistem nilai yang memandang secara positif-optimis terhadap kemajemukan dengan menerima sebagai kenyataan dan berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan itu. (Madjid 2003, hal. 32).

Makna pluralisme adalah wujud dari “ikatan keadaban” (*bond of civility*), dalam arti bahwa masing masing pribadi atau kelompok, dalam suatu lingkungan interaksi sosial yang lebih luas, memiliki kesediaan memandang yang lain dengan penghargaan, betapapun perbedaan yang ada, tanpa saling memaksakan kehendak, pendapat, atau pandangan sendiri.

Dari pemahaman ini sesungguhnya kemajemukan atau pluralisme di Indonesia tidak cukup dengan mengatakan bahwa masyarakat Indonesia majemuk, beraneka ragam terdiri dari berbagai suku, agama yang justru menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekedar kebaikan negatif, hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme. Pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban, atau suatu pertemuan yang sejati dari keberagaman dalam ikatan-ikatan kesopanan, bahkan pluralisme suatu keharusan bagi keselamatan ummat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan. (Madjid 2003, hal. 31-33).

Jadi dibutuhkan pandangan hidup yang lebih kosmopolit yaitu tata pergaulan nasional dalam arti lahiriah maupun maknawiyah yang berwawasan meliputi seluruh anggota bangsa. Ini mengingatkan bahwa Indonesia berbentuk dari gabungan berbagai kelompok etnis, ras, agama, serta suku yang beragam. Dari sini dapat diketahui bahwa pluralisme tidak sebatas kesadaran moral yang tidak punya implikasi-implikasi yang berpengaruh pada tatanan kehidupan sosial.

Dalam pandangan yang sama Kuntowijoyo berpandangan bahwa Islam mengakui adanya diferensiasi dan bahkan polarisasi sosial. Al-Qur'an menggariskan bahwa fenomena ketidaksamaan sosial tersebut sebagai sunnatullah, sebagai hukum alam dan realitas empiris yang ditakdirkan terhadap dunia manusia. (Kuntowijoyo 1991, hal. 299).

## 2. Toleransi

Nabi Muhammad di Madinah pernah mencatatkan sejarah gemilang dalam pengamalan toleransi dan kebebasan beragama dalam sejarah umat manusia di dunia. Prinsip kebebasan beragama diterapkan oleh Nabi di tengah masyarakat yang plural dan majemuk. Nabi Muhammad berhasil membangun masyarakat yang berkedudukan sama di depan hukum melalui piagam madinah. Prinsip kekuasaan berdasarkan hukum, kesamaan semua orang di depan hukum, toleransi dan kebebasan beragama serta paham pluralisme merupakan kontribusi peradaban Islam yang sangat besar kepada umat manusia. (Madjid 2003, hal. 134-135).

Pemahaman toleransi yang selama ini dipahami oleh sebagian besar masyarakat kita nampaknya masih relatif terbatas pada persoalan prosedural, dan tata-cara pergaulan yang baik antara berbagai kelompok yang berbeda-beda. Padahal toleransi adalah persoalan prinsip, tidak hanya sekedar prosedur. Toleransi adalah persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang baik antar berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu

harus dipahami sebagai hikmah atau manfaat dari pelaksanaan suatu ajaran yang benar. (Madjid 2003, hal. 134-135).

Makna toleransi bukanlah sejenis netralisme kosong yang bersifat prosedural semata-mata, tetapi suatu pandangan hidup yang berakar dalam kebenaran ajaran agama. Sehingga, para pemeluk agama ditentang untuk dapat dengan kongkrit menggali ajaran-ajaran agamanya dan mengembangkan paham toleransi yang otentik dan absah serta berangkat dari ajaran kebenaran. Oleh karena itu, toleransi sebagai salah satu azas masyarakat madani menurut Nurcholish Madjid lebih prinsipil dari pada toleransi yang tumbuh di masyarakat Eropa. (Madjid 1997, hal. 134-135).

Pada persoalan kebebasan Nurcholish Madjid juga berpandangan bahwa kehidupan yang utuh, integral dan memenuhi fungsi kekhalifahan kemanusiaan universal, berpangkal dari kebebasan nurani, yaitu dari setiap bentuk pemaksaan, sekalipun pemaksaan yang dilakukan atas nama kebenaran mapan (*established truth*) sesuatu yang jelas benar dan baik. Keutuhan hidup manusia dimulai dengan adanya kebebasan padanya menerima atau menolak atas sesuatu yang berkaitan erat dengan nilai hidup pribadinya yang mendalam. Lebih lebih setelah mencapai tingkat peradaban seperti yang ditampilkan sejak kurang lebih 15 abad terakhir. (Madjid 1997, hal. 48).

Dalam Islam azas pluralisme dan toleransi bukan sesuatu yang tidak berdasar, sewaktu Nabi Muhammad meletakkan azas-azas pluralisme dan toleransi dalam piagam madinah, dengan sendirinya Nabi sama sekali tidaklah bertindak atas dasar kepentingan sesaat dan kegunaan jangka pendek, tapi karena ajaran prinsipil dalam agama yang diwahyukan kepadanya.

Nurcholish Madjid menangkap pentingnya penghargaan oleh ummat Islam terhadap kelompok lain. Oleh karena itu, ungkapan, "*al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaih*" tidak mesti memunculkan klaim-klaim eksklusivistik bagi ummat Islam. Sebaliknya kalangan non-muslim juga dapat memposisikan diri dalam posisi yang wajar sebagai



komponen bangsa, sehingga menggiring pada *common platform* (*platform* bersama), yang merupakan implementasi dari azas pluralisme dan toleransi. (Madjid 2003, hal. 134-135).

Kedua Azas yang dikemukakan ini menjadi penyangga berdirinya sebuah masyarakat madani. Dimana azas tersebut menjadi pokok dalam menciptakan suatu tatanan masyarakat madani di tengah kemajemukan suku, ras, agama, budaya, dan lain lain-lain. Dalam perspektif sejarah Islam telah terbukti melalui usaha reformasi Nabi Muhammad di Madinah, sedangkan dalam konteks keindonesiaan azas ini perlu penghayatan yang lebih mendalam. Sebab, dengan ini diharapkan muncul kerukunan dan kebersamaan, dalam latar belakang keberagaman masing masing. (Madjid 2003, hal. 134-135).

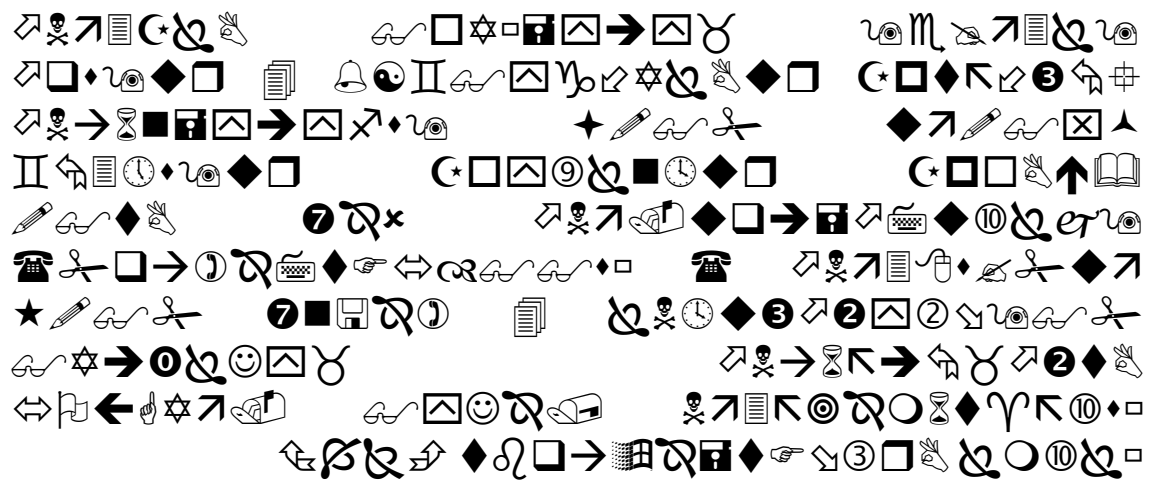
Sebagaimana diketahui bahwa Nurcholish Madjid adalah tokoh cendekiawan muslim Indonesia yang paling segar dan intens menyuarakan pentingnya kesadaran pluralisme dan toleransi. Pada prinsipnya secara substansial gagasan-gagasan yang dilontarkan sejak tahun tujuh-puluhan telah berhasil menggiring pada ide masyarakat madani. Semangat pemikiran ini selalu mewarnai setiap gagasan gagasan Nurcholish Madjid hingga akhir hayatnya.

Untuk merumuskan konsep membangun masyarakat madani Nurcholish Madjid mensintesakan antara peradaban “Barat” dan “Islam”, oleh karena itu Nurcholish Madjid menggalinya dari kedua sumber tersebut yaitu dari sumber Islam dan Barat. Dari sumber Islam Nurcholish Madjid merujuk pada Qur’an dan hadist, sejarah Nabi Muhammad dan piagam Madinah serta pemikiran Ibnu Taimiyah. (Riyana 2003, hal. 12).

#### 1. Qur’an dan Hadits

Sumber yang berasal pada Qur’an dan Hadits sebetulnya di angkat Nurcholish Madjid ketika ia berbicara azas pluralisme dan toleransi sebagai pilar utama

terbangunnya masyarakat Madinah. Nurcholish Madjid berargumen, bahwa ayat-ayat Al-Qur'an telah menyatakan bahwa pluralisme adalah kepastian dari Allah. Pluralisme bukanlah keunikan masyarakat atau bangsa tertentu. Berkaitan dengan hal itu Nurcholish madjid mengutip surah *Al-Ma'idah*: 48. (Majid 1992, hal. 176).

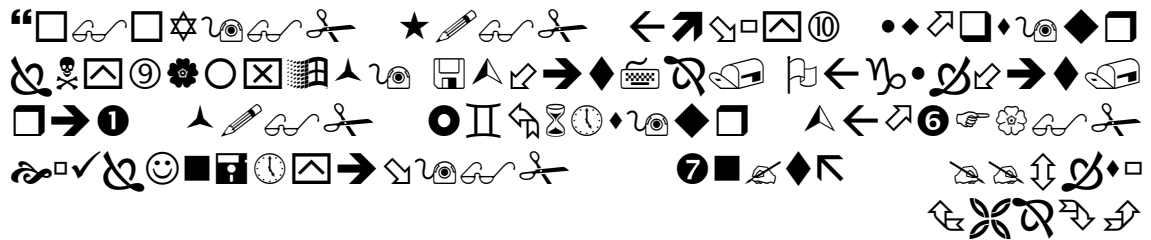


Artinya: "...bagi tiap umat di antara kami, Kami (tuhan) telah buatnkan peraturan dan jalan. Kalau seandainya Allah menghendaki tentu dijadikan-Nya kamu sekalian umat yang tunggal. Tetapi Dia hendak menguji kamu berkenaan dengan hal hal (karunia, kelebihan) yang diberikan kepadamu. Maka berlomba-lombalah kamu sekalian dalam kebaikan. Kepada Allah tempat kembalimu semua, maka Dia akan memberitahu kamu berkenaan dengan hal-hal yang dahulu (di dunia) kamu berselisih dalamnya” (*Al-Maidah*: 48)

Kemudian Nurcholish Madjid menyatakan bahwa dalam Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar mereka saling mengenal dan menghargai, *sebagaimana* terdapat dalam surah *al-Hujurat*: 13. Berdasarkan surah ini menurut Nurcholish Madjid, hendaknya muncul sikap yang memandang secara positif-optimis terhadap kemajemukan itu sendiri, dengan menerimanya sebagai kenyataan dan berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan itu. (Madjid 1992, hal. lxxii).

Tidak hanya itu, Nurcholish madjid juga berpendapat bahwa pluralisme adalah suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia melalui mekanisme pengawasan dan

pengimbangan yang dihasilkannya. Pendapat ini didasarkan pada surah *al-Baqarah*: 251.



Artinya: “Seandainya Allah tidak mengimbangi segolongan manusia dengan golongan yang lain, maka pastilah bumi hancur, namun Allah mempunyai kemurahan yang melimpah kepada seluruh alam”. (*al-Baqarah*: 251)

Maksudnya dapat dikatakan bahwa pluralisme sebagai aturan Tuhan (*sunnatullah*) yang tidak akan berubah, juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Islam dengan kitab sucinya Al-Qur’an mengakui hak hak agama lain, kecuali yang berdasarkan syirik, untuk hidup menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Kemudian pengakuan akan hak agama-agama lain itu sendirinya merupakan dasar paham kemajemukan sosial budaya dan agama sebagai ketetapan Tuhan yang tidak berubah-ubah. (Madjid 1992, hal. lxxvii-lxxviii).

Berkenaan dengan azas toleransi, Nurcholish Madjid juga mendasarkan pada ayat –ayat Qur’an. Menurutnya Islam tidak boleh memaksakan pemeluk agama lain yang mengakui Tuhan, hari kemudian, serta berbuat baik, untuk meyakini Islam sebagai satu-satunya agama. Islam sebagai agama terakhir mengakui hak-hak agama dan kewajiban peribadatnya, seperti yang terdapat pada surah *al-Baqarah*: 256, surah *Yunus*: 99 dan surah *al-Kafirun*:1-6. Kemudian Nurcholish Madjid juga melengkapi ayat –ayat tersebut dengan Surah *al-Ma’idah*: 48. Inilah yang mendasari toleransi beragama yang menjadi ciri sejati Islam dalam sejarahnya yang otentik. (Madjid 1992, hal. lxxvii-lxxviii).

Di samping mengambil sumber dari al-Qur'an, Nurcholish Madjid juga mengambil sumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya seperti arti Hadis berikut ini:

Ibn Abbas menuturkan bahwa Nabi ditanya, "Agama mana paling dicintai Allah?". Nabi menjawab, "semangat yang kebenaran yang toleran".(Hadis Riwayat Imam Ahmad).

Sumber-sumber yang digali dari dalil dalil Qur'an dan Hadis tersebut semakin mempertegas bahwa secara doktrin konsep masyarakat madani yang digagas Nurcholish Madjid bersumber pada kedua sumber pokok ajaran Islam.

## 2. Piagam Madinah

Perwujudan masyarakat madani untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia merupakan hasil usaha Nabi Muhammad di kota Yastrib, yang kemudian dikenal dengan nama Madinah, untuk membangun masyarakat madani Nabi menetapkan suatu dokumen perjanjian yang disebut Piagam Madinah. Dengan piagam ini proses pembentukan masyarakat madani dapat terlaksana, sebab dapat mempersatukan berbagai komunitas yang sangat majemuk dan heterogen di Yastrib ketika itu. Sebelum Nabi berhijrah, penduduk Yastrib terdiri dari orang orang Yahudi dan Arab. (Madjid 1995, hal. 41). Dimana di antara beberapa suku di dalamnya mengalami pertikaian dan permusuhan. Dengan kondisi ini tentu sangat merugikan penduduk Yastrib sehingga harus ada upaya perdamaian dengan melakukan berbagai usaha, dan akhirnya mereka bersepakat untuk mengundang Nabi untuk datang ke Yastrib.

Akhirnya Nabi hijrah ke Yastrib, setibanya di Yastrib Nabi Muhammad membangun tatanan hidup secara kolektif di tengah kemajemukan penghuni kota Yastrib yang meliputi semua golongan yang ada di Yastrib. Menurut Nurcholish Madjid, inilah gebrakan terpenting yang dilakukan Nabi yaitu mempersaudarakan antara imigran muslim pendatang dan kaum muslim penyambut (yang kemudian disebut

kaum Muhajirin dan kaum Anshar). (Madjid 1994, hal. 238). Persaudaraan itu sedemikian kentalnya, sehingga mereka yang dipersaudarakan itu meskipun tidak mempunyai hubungan darah, dapat saling mewarisi. (Madjid 1994, hal. 238). Namun yang lebih penting dari usaha Nabi tersebut adalah mengupayakan perjanjian hidup bersama secara damai diantara berbagai golongan yang ada, baik Islam maupun golongan Yahudi. maka kesepakatan antara berbagai kelompok tersebut, secara formal tertulis dalam suatu naskah yang kemudian disebut dengan piagam. Dokumen ini sangat penting karena di dalamnya memperjelas keberadaan status non-muslim dan dalam mayoritas masyarakat muslim.

Menurut Nurcholish Madjid, inilah tahap awal yang dilakukan Nabi dalam menata komunitas-komunitas masyarakat Yastrib ke arah suatu tatanan “masyarakat baru”, yakni dengan menetapkan suatu dokumen perjanjian yang disebut “*mitsaq al-Madinah*” (Piagam Madinah). Atau juga dikatakan dengan konstitusi ini telah terjadi perjanjian sosial (*social-contrac*). (Madjid 2004, hal. 44). Antara kaum *Muhajirin* (komunitas muslim Mekkah) dan *Anshor* (komunitas muslim Madinah) dengan kaum Yahudi dan golongan-golongan lain untuk hidup dalam tata-sosial politik baru.

Piagam Madinah ini menjamin keberadaan orang orang Yahudi sebagai salah satu komunitas dan menekankan kerjasama seerat mungkin dengan sesama muslim. Kerjasama tersebut untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman bersama di negeri Yastrib. Sedangkan hal yang menyangkut peraturan dan tata tertib umum, otoritas mutlak diberikan kepada Nabi untuk memutuskan dan mengadili perselisihan-perselisihan antara mereka. Nabi Muhammad ditetapkan sebagai salah satu hakim tertinggi yang memberikan peraturan menurut hukum Tuhan. Kemudian di abad modern, prinsip kebebasan beragama menjadi salah satu dasar yang diundangkan oleh berbagai negara dalam konstitusinya bahkan tercantum juga dalam *Declaration of Human Rights* (1984) pasal 18, dan *Convention on Civil and Political Rights* (1966)

pasal 18 yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (Pulungan, 1996: 156-169).

Nurcholish Madjid menilai sesungguhnya inilah dokumen politik pertama dalam sejarah umat manusia yang meletakkan dasar-dasar pluralisme dan toleransi. Semua sarjana mengetahui dan mengakui entitas piagam Madinah itu sebagai pilar pertama dan utama dalam mewujudkan masyarakat madani. Piagam Madinah juga merupakan perwujudan dari penjelasan komitmen politik masing-masing kelompok dengan batas-batas hak dan kewajiban yang kongkrit antara Muhajirin dan Anshor. Di bagian lain juga menjelaskan perjanjian damai antara Nabi dan kaum Yahudi, piagam Madinah memuat 47 Pasal.

*Mitsaq al-Madinah* atau yang disebut piagam Madinah ini jelas sekali mengagungkan dan menempatkan hak dan kewajiban pada suatu posisi yang terpenting. Misalnya kewajiban suatu komunitas turut membela komunitas lain ketika dihadapkan pada suatu intimidasi dan peperangan sebagai konsekwensi logis dari komunitas yang telah diikat oleh ikatan persaudaraan. Di sisi lain juga adanya jaminan perlindungan hak-hak azasi dan kebebasan memeluk dan melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing masing. Juga terdapat kepastian hukum, dengan sendirinya menghindari terjadinya penindasan dan kesewenang-wenangan.

Disinilah barangkali Nurcholish Madjid berpandangan bahwa dengan konstitusi Madinah, Nabi telah meletakkan dasar-dasar pluralisme dan toleransi. Dua dimensi nilai universal yang merupakan landasan utama pembentukan masyarakat berperadaban di Madinah. Tetapi muatan nilai yang terkandung pada piagam itu jauh lebih umum dan mendasar dari dua dimensi di atas.

Pada hakekatnya perwujudan masyarakat madani ketika itu tidak terlepas dari sikap keterbukaan ummat Islam. Sikap keterbukaan itu sendiri menurut Nurcholish

Madjid adalah implementasi dari paham universalisme Islam sebagai bagian dari konsep masyarakat Madani.

### 3. Pemikiran Ibnu Taimiyah

Nurcholish Madjid memahami Islam sebagai suatu sikap ketertundukan yang diadopsi dari pemikiran Ibnu Taimiyah, seorang pemikir muslim. Islam merupakan hakekat dari agama yaitu sikap tunduk dan pasrah kepada Allah dengan tulus, karena tidak ada agama yang bakal diterima oleh Allah kecuali Islam. (Madjid 2003, hal. 102). Pemahaman Islam sebagai upaya untuk tunduk dan pasrah kepada Allah, tidak kepada yang lain, ini artinya bahwa orang yang tidak menyerah dan pasrah kepada Allah, maka dia adalah sombong dan berarti dia telah syirik.

Lebih lanjut bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah akan sangat jelas terlihat bila dipelajari seluruh substansi pemikiran Nurcholish Madjid. Dapat diperkirakan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah tersebut secara utuh ditemukan Nurcholish Madjid ketika ia mengikuti dan menyelesaikan program doctor di Chicago University, AS tahun 1978-1984. Bahkan dalam penyelesaiannya Nurcholish Madjid menulis disertasi tentang pemikiran Ibnu Taimiyah dengan judul "*Ibnu Taimiyah on Kalam and Falsafah: Problem of Reason and Revelation in Islam*" (1984).

Kemudian Nurcholish Madjid mencatat bahwa metodologi pemahaman Ibnu Taimiyah kepada agama menolak otoritas mana saja kecuali al-Qur'an dan sunah. Implikasi dari metodologinya itu antara lain, menjadikannya amat kritis kepada hampir semua pemikir Islam yang mapan terutama filsafat dan kalam. Ibnu Taimiyah memang tidak berhasil menciptakan suatu gerakan besar, tetapi dinamika ide-idenya justru berlanjut terus mempengaruhi sejarah intelektual Islam. (Madjid 1994, hal. 42-43). Dimana corak pemikirannya juga diikuti oleh Nurcholish Madjid.

Selain mengambil sumber sumber yang berasal dari Islam, Nurcholish Madjid juga menggali sumber pembentukan masyarakat madani melalui sumber sumber yang

berasal dari Barat. Hubungan konseptual antara konsep masyarakat madani dengan nilai Islam, menurut Nurcholih Madjid dapat ditemukan dalam prinsip demokrasi, sebagai salah satu komponen masyarakat madani. Artinya Nurcholish menyajikan sumber pembentukan masyarakat madani dengan mengambil prinsip demokrasi, tokoh-tokoh Barat.

*Pertama, Prinsip Demokrasi.* Dalam mengawali rumusan masyarakat madani Nurcholish Madjid menggunakan istilah demokrasi. Demokrasi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani “demos”(masyarakat) dan “kratia” (aturan atau kekuasaan). (Fachruddin 2006, hal. 25). Dalam pengertian lain secara definitif demokrasi adalah cara hidup, adanya keinginan untuk berkompromi, toleransi, dan kesediaan mendengar dan menerima pendapat orang lain.(Fachruddin 2006, hal. 27).

Demokrasi yang ditegakkan adalah untuk mewujudkan *civil society* dengan menjadikan demokrasi sebagai pandangan hidup. Sekalipun demokrasi berasal dari barat, namun prinsip-prinsip demokrasi tersebut menurut Nurcholish Madjid telah ada dalam tubuh Islam. Oleh sebab itu, pandangan hidup demokratis adalah cerminan sikap, jiwa dan semangat peradaban yang telah menjadi pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sebetulnya dalam kasus lain demokrasi masih menjadi sesuatu yang dipertentangkan oleh sebagai umat Islam jika dibenturkan dengan masalah kedaulatan. (Fachruddin 2006, hal. 28).

Menurut Nurcholish Madjid, demokrasi bukanlah semata-mata masalah prosedural, tetapi masalah prinsipil karena merupakan suatu pandangan hidup. Nurcholish Madjid juga mengemukakan beberapa catatan penting pandangan hidup demokratis, antara lain: (1) pentingnya kesadaran kemajemukan dan pluralisme, (2) keinsafan dan kedewasaan untuk tulus menerima kemungkinan kompromi atau mengalah, dan kedewasaan untuk mengemukakan perbedaan, mendengarkan pendapat orang lain, menerima perbedaan pendapat, dan kemungkinan mengambil pendapat yang



lebih baik. (3) menolak monolitisme dan absolutisme, (4) keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan.(Madjid 1997, hal. 212). Nurcholish Madjid juga berpandangan bahwa demokrasi sebagai nilai yang dinamis. Dengan mengutip pendapat Willy Eicheler dalam bukunya *Fundamental Values and Basic Demands of Democratic Socialisme* Nurcholish Madjid mengungkapkan, demokrasi bukanlah suatu nilai statis yang terletak pada suatu tempat di hadapan mata, lalu dengan mudah dapat dicapai, tetapi demokrasi suatu nilai dinamis, sebab nilai esensialnya adalah proses ke arah yang lebih maju dan baik dibanding dengan yang sedang dialami oleh suatu masyarakat atau Negara. (Madjid 1997, hal. 210). Dengan demikian demokrasi identik maknanya dengan makna demokratisasi.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa konsep masyarakat madani yang dilontarkan Nurcholish Madjid bersumber dari konsep demokrasi yang telah dielaborasi dengan konsep Islam, dengan terlebih dahulu Nurcholish Madjid menyerapnya dari tokoh tokoh “*islamis*” Barat.

*Kedua*, Tokoh-tokoh Barat. Nurcholish Madjid berpandangan bahwa secara umum pemikiran para tokoh Barat tidak mendiskreditkan Islam. Paling tidak pemikiran mereka dinilai Nurcholish Madjid sebagai pandangan yang melihat Islam dari “luar” dengan objektif. Nurcholish Madjid paling tidak banyak terinspirasi oleh pemikiran cendikiawan barat antara lain: Robert N. Bellah, Masrshall G.S. Hodgson, Ernest Gellner dan Erich Fromm. Nurcholish Madjid menilai bahwa mereka Robert N. Bellah, Masrshall G.S. Hodgson, dan Ernest Gellner adalah para sarjana barat yang membicarakan Islam dengan nada baik. (Madjid 1995, hal. 15).

Nurcholish Madjid mengutip pemikiran Robert N. Bellah tentang masyarakat madani sebagai masyarakat yang untuk zaman dan tempatnya sangat modern. Pemikiran ini nampaknya makin memperkuat argumennya, bahwa masyarakat madani yang dicita-citakan adalah bentuk masyarakat yang pernah ditemui pada masa

Rasulullah. (Madjid 1999, hal. 169). Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat warisan Nabi yang bercirikan masyarakat egalitarianisme, terbuka dan demokratis serta lebih menekankan semangat pluralisme dan toleransi. Oleh Robert N. Bellah dikatakan masyarakat yang telah modern ingin dikembangkan Nurcholish Madjid dalam konteks Indonesia dengan istilah masyarakat madani.

Pada dasarnya konsep masyarakat madani itu sendiri sesuai dengan aspek ajaran Islam yaitu tuntutan etis dalam pola kehidupan masyarakat manusia dengan ciri-ciri kemajuan dan peradaban yang tinggi, dan sesuai dengan istilah Madinah seperti yang dibangun Nabi. Berkaitan dengan ini Masrshall G.S. Hodgson mengatakan bahwa ajaran nabi yaitu Islam pada esensinya bersifat kota secara radikal. Pendapat ini menurut Nurcholish Madjid sejalan dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Menurutnya gerakan Nabi ketika itu dikatakan radikal karena berjuang merobah pola hidup orang-orang Arab jahiliyah yaitu tiada keteraturan, tiadanya pranata kepemimpinan masyarakat yang mapan, kesukuan dan nomad. (Madjid 1992, hal. 315).

Sedangkan pemikiran Erich Fromm yang dirujuk Nurcholish Madjid banyak berkaitan dengan proses demokratisasi yaitu demokrasi mengimplikasikan munculnya kebebasan, namun banyak kalangan yang takut dan mengkhawatirkan munculnya kebebasan. Padahal kebebasan itu menurut Erich Fromm adalah mengambil tanggung jawab pada diri sendiri. Ketakutan ini biasa menjadi penghalang utama atas terwujudnya demokrasi. (Madjid 1995, hal. 185). Pemikiran keagamaan Erich Fromm yang juga diambil Nurcholish Madjid yang kemudian memunculkan pemikiran inklusivisme Islam bukan eksklusivisme Islam, artinya lebih mementingkan hal-hal yang substansial dari aspek normatif dan simbolis.

Kemudian perilaku dan sikap keberagaman ini juga turut berpengaruh dalam terwujudnya *civility* masyarakat yang bersiap diri menuju masyarakat madani. Tanpa kualitas *civility* tersebut sangat sulit mengaplikasikan dan merealisasikan cita-cita

*society*. Maka untuk perwujudan sebagai penunjang utama adalah media pendidikan. Sebab, bagaimana mungkin mewujudkan masyarakat yang memiliki semangat keterbukaan, kebebasan, egalitarianisme dan menjunjung jiwa demokratis, maju dan modern, bila sikap mental masyarakat masih menganut pola hidup Arab jahiliyah. Untuk merubah pola nomad inilah kehadiran institusi pendidikan amat diperlukan. Dan hal ini sesuai dengan inti ajaran Islam yang esensinya bersifat “kota” dan misi Nabi Muhammad sebagai pelopor reformasi Madinah yang bertujuan merubah dan meningkatkan pola hidupnya. (Sanaky 2003, hal. 32-33).

Rumusan konsep masyarakat madani yang sesuai dengan gagasan Nurcholish Madjid sebagai sintesa antara Barat dan Islam yang bersumber dari khazanah Islam dan tradisi barat, maka institusi pendidikan diproyeksikan mampu menjawab persoalan di atas yang merupakan perpaduan antara sistem tradisional dan modern. Institusi pendidikan tersebut lahir dari kultur Indonesia yang asli yang dikompromikan dengan sistem modern. (Sanaky 2003, hal. 33).

## **Sejarah Berdirinya HMI**

### *a. Latar Belakang Sejarah HMI*

Jika ditinjau secara umum paling tidak ada 4 (empat) permasalahan yang menjadi latar belakang sejarah berdirinya HMI yaitu sebagai berikut:

#### 1. Situasi Dunia Internasional

Berbagai argumen telah diungkapkan sebab-sebab kemunduran umat Islam. Tetapi hanya satu hal yang mendekati kebenaran, yaitu bahwa kemunduran ummat Islam diawali dengan kemunduran berpikir, bahkan sama sekali menutup kesempatan untuk berpikir. (Sitompul 1976, hal. 57). Yang jelas ketika ummat Islam terlena dengan kebesaran dan keagungan masa lalu, maka pada saat itu pula kemunduran menghinggapinya kita. Akibat dari keterbelakangan ummat Islam, maka muncullah gerakan

untuk menentang keterbatasan seseorang melaksanakan ajaran Islam secara benar dan utuh. Gerakan ini disebut Gerakan Pembaharuan. Gerakan Pembaharuan ini ingin mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran yang totalitas, dimana disadari oleh kelompok ini, bahwa Islam bukan hanya terbatas kepada hal-hal yang sakral saja, melainkan juga merupakan pola kehidupan manusia secara keseluruhan. (Tanja 1991, hal. 52-53). Untuk itu sasaran Gerakan Pembaruan atau reformasi adalah ingin mengembalikan ajaran Islam kepada proporsi yang sebenarnya, yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW.

Dengan timbulnya ide pembaharuan itu, maka Gerakan Pembaruan di dunia Islam bermunculan, seperti di Turki (1720), Mesir (1807). Begitu juga penganjurnya seperti Rifaah Badawi Ath Tahtawi (1801-1873), Muhammad Abduh (1849-1905), Muhammad Ibnu Abdul Wahab (Wahabisme) di Saudi Arabia (1703-1787), Sayyid Ahmad Khan di India (1817-1898), Muhammad Iqbal di Pakistan (1876-1938) dan lain-lain. (Tanja 1991, hal. 55).

## 2. Situasi NKRI

Tahun 1596 Cornelis de Houtman mendarat di Banten. Maka sejak itu pulalah Indonesia dijajah Belanda. Imprealisme Barat di Jawa selama  $\pm$  350 tahun membawa paling tidak 3 (tiga) hal; penjajahan itu sendiri dengan segala bentuk implikasinya, misi dan zending agama Kristiani, peradaban Barat dengan ciri sekulerisme dan liberalisme. (Sitompul 1976, hal. 57). Setelah melalui perjuangan secara terus menerus dan atas rahmat Allah SWT, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta Sang Dwi Tunggal Proklamasi atas nama bangsa Indonesia mengumandangkan kemerdekaannya.

Kondisi umat Islam sebelum berdirinya HMI dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) golongan (Sitompul 1978, hal. 30); *pertama*, sebagian besar yang melakukan ajaran Islam itu hanya sebagai kewajiban yang diadatkan seperti dalam upacara

perkawinan, kematian serta kelahiran. *Kedua*, golongan alim ulama dan pengikut-pengikutnya yang mengenal dan mempraktekkan ajaran Islam sesuai yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. *Ketiga*, golongan alim ulama dan pengikut-pengikutnya yang terpengaruh oleh mistikisme yang menyebabkan mereka berpendirian bahwa hidup ini adalah untuk kepentingan akhirat saja. *Keempat*, golongan kecil yang mencoba menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, selaras dengan wujud dan hakekat agama Islam. Mereka berusaha supaya agama Islam itu benar-benar dapat dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia.

### 3. Kondisi Perguruan Tinggi dan Dunia Kemahasiswaan

Ada dua faktor yang sangat dominan yang mewarnai Perguruan Tinggi (PT) dan dunia kemahasiswaan sebelum HMI berdiri (Tanja 1991-52-57); *pertama*, sistem yang diterapkan dalam dunia pendidikan umumnya dan PT khususnya adalah sistem pendidikan barat, yang mengarah kepada sekulerisme yang "mendangkalkan agama di setiap aspek kehidupan manusia. *Kedua*, adanya Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY) dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) di Surakarta dimana kedua organisasi ini di bawah pengaruh Komunis. Bergabungnya dua paham ini (Sekuler dan Komunis), melanda dunia PT dan Kemahasiswaan, menyebabkan timbulnya "Krisis Keseimbangan" yang sangat tajam, yakni tidak adanya keselarasan antara akal dan kalbu, jasmani dan rohani, serta pemenuhan antara kebutuhan dunia dan akhirat.

#### *b. Latar Belakang Pemikiran*

Berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) diprakasai oleh Lafran Pane, seorang mahasiswa STI (Sekolah Tinggi Islam), kini UII (Universitas Islam Indonesia) yang masih duduk di tingkat I. Tentang sosok Lafran Pane, dapat diceritakan secara garis besarnya antara lain bahwa Pemuda Lafran Pane lahir di Sipirok-Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pemuda Lafran Pane yang tumbuh dalam lingkungan nasionalis-

muslim pernah mengenyam pendidikan di Pesantren, Ibtidaiyah, Wustha dan sekolah Muhammadiyah. (Sitompul 1976, hal. 157).

Adapun latar belakang pemikirannya dalam pendirian HMI adalah: "Melihat dan menyadari keadaan kehidupan mahasiswa yang beragama Islam pada waktu itu, yang pada umumnya belum memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Keadaan yang demikian adalah akibat dari sistem pendidikan dan kondisi masyarakat pada waktu itu. Karena itu perlu dibentuk organisasi untuk merubah keadaan tersebut. Organisasi mahasiswa ini harus mempunyai kemampuan untuk mengikuti alam pikiran mahasiswa yang selalu menginginkan inovasi atau pembaruan dalam segala bidang, termasuk pemahaman dan penghayatan ajaran agamanya, yaitu agama Islam. Tujuan tersebut tidak akan terlaksana kalau NKRI tidak merdeka, rakyatnya melarat. Maka organisasi ini harus turut mempertahankan Negara Republik Indonesia ke dalam dan keluar, serta ikut memperhatikan dan mengusahakan kemakmuran rakyat. (Sitompul 1976, hal. 158).

### *c. Peristiwa-Peristiwa Bersejarah HMI*

Setelah beberapa kali mengadakan pertemuan yang berakhir dengan kegagalan. Lafran Pane mengadakan rapat tanpa undangan, yaitu dengan mengadakan pertemuan secara mendadak yang mempergunakan jam kuliah Tafsir. Ketika itu hari Rabu tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H, bertepatan dengan 5 Februari 1947, di salah satu ruangan kuliah STI di Jalan Setiodiningratan (sekarang Panembahan Senopati), masuklah mahasiswa Lafran Pane yang dalam prakatanya dalam memimpin rapat antara lain mengatakan "Hari ini adalah pembentukan organisasi Mahasiswa Islam, karena persiapan yang diperlukan sudah beres. Yang mau menerima HMI sajalah yang diajak untuk mendirikan HMI, dan yang menentang biarlah terus menentang, toh tanpa mereka organisasi ini bisa berdiri dan berjalan". (Tanja 1991, hal 53).

Pada awal pembentukannya, HMI bertujuan di antaranya adalah; mempertahankan dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia; menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. (Tanja 1991, hal. 54).

Sementara tokoh-tokoh pemula/pendiri HMI antara lain:

Lafran Pane (Yogya), Karnoto Zarkasyi (Ambarawa), Dahlan Husein (Palembang), Maisaroh Hilal (Singapura), Suwali, Yusdi Ghozali (Semarang), Mansyur, Siti Zainab (Palembang), M. Anwar (Malang), Hasan Basri, Marwan, Zulkarnaen, Tayeb Razak, Toha Mashudi (Malang), Baidron Hadi (Yogyakarta). (Sitompul 1978, hal. 33).

#### *d. Faktor Pendukung dan Penghambat Berdirinya HMI*

Di antara faktor pendukungnya adalah; posisi dan arti kota Yogyakarta .Yogyakarta sebagai Ibukota NKRI dan Kota Perjuangan; merupakan pusat gerakan Islam; kota universitas/kota pelajar; pusat kebudayaan; terletak di *Central of Java*; kebutuhan penghayatan dan keagamaan mahasiswa; adanya tuntutan perang kemerdekaan bangsa Indonesia; adanya STI (Sekolah Tinggi Islam), BPT (Balai Perguruan Tinggi), Gajah Mada, STT (Sekolah Tinggi Teknik); serta adanya dukungan Presiden STI Prof. Abdul Kahar Muzakir dan umat Islam Indonesia mayoritas. (Tanja 1991, hal. 56).

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain; munculnya reaksi-reaksi dari; Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY), Gerakan Pemuda Islam (GPII), dan Pelajar Islam Indonesia (PII). (Sitompul 1978, hal. 35).

#### *e. Perkembangan HMI*

Sejalan dengan perkembangan waktu, HMI terbelah menjadi dua, yaitu pasca diselenggarakannya Kongres ke-15 HMI di Medan pada tahun 1983. Pada tahun 1986, HMI yang menerima azas tunggal Pancasila dengan pertimbangan-pertimbangan politis beserta tawaran-tawaran menarik lainnya, rela melepaskan azas Islam sebagai azas organisasi. Selanjutnya HMI pihak ini disebut sebagai HMI DIPO, dikarenakan bersekretariat di Jalan Pangeran Diponegoro Jakarta. Sedangkan HMI yang tetap

mempertahankan azas Islam kemudian dikenal dengan istilah HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi). (Suharsono, 1997, hal. 39-40).

Karena alasan untuk menyelamatkan HMI dari ancaman pembubaran oleh rezim Orde Baru, maka melalui Kongres Padang disepakatilah penerimaan asas tunggal Pancasila. Setelah penerimaan asas tunggal itu, HMI yang bermarkas di Jalan Diponegoro sebagai satu-satunya HMI yang diakui oleh negara. Namun pada Kongres Jambi 1999, HMI (DIPO) kembali kepada asas Islam. Namun demikian, HMI DIPO dan HMI MPO tidak bisa disatukan lagi, meski azasnya sudah sama-sama Islam. Perbedaan karakter dan tradisi keorganisasian yang sangat besar di antara keduanya, membuat kedua HMI ini sulit disatukan kembali. HMI DIPO nampak lebih berwatak akomodatif dengan kekuasaan dan cenderung pragmatis, sementara HMI MPO tetap mempertahankan sikap kritisnya terhadap pemerintah. (Suharsono 1997, hal. 39-45). Sampai saat ini, HMI merupakan salah satu organisasi mahasiswa terbesar dan tertua di Indonesia.

#### *f. Kongres-Kongres HMI*

1. Kongres ke-1 di Yogyakarta pada tanggal 30 November 1947, dengan ketua terpilih HS Mintareja
2. Kongres ke-2 di Yogyakarta pada tanggal 15 Desember 1951, dengan ketua terpilih A. Dahlan Ranuwiharja
3. Kongres ke-3 di Jakarta pada tanggal 4 September 1953 dengan formatur terpilih Deliar Noer
4. Kongres ke-4 di Bandung pada tanggal 14 Oktober 1955 dengan formatur terpilih Amir Rajab Batubara
5. Kongres ke-5 di Medan pada tanggal 31 Desember 1957 dengan formatur terpilih Ismail Hasan Metareum
6. Kongres ke-6 di Makassar (Ujungpandang) pada tanggal 20 Juli 1960 dengan formatur terpilih Nursal
7. Kongres ke-7 di Jakarta pada tanggal 14 September 1963 dengan formatur terpilih Sulastomo
8. Kongres ke-8 di Solo (Surakarta) pada tanggal 17 September 1966 dengan formatur terpilih Nurcholish Madjid
9. Kongres ke-9 di Malang pada tanggal 10 Mei 1969 dengan formatur terpilih Nurcholish Madjid
10. Kongres ke-10 di Palembang pada tanggal 10 Oktober 1971 dengan formatur terpilih Akbar Tanjung



11. Kongres ke-11 di Bogor pada tanggal 12 Mei 1974 dengan formatur terpilih Ridwan Saidi
12. Kongres ke-12 di Semarang pada tanggal 16 Oktober 1976 dengan formatur terpilih Chumaidy Syarif Romas
13. Kongres ke-13 di Makassar (Ujungpandang) pada tanggal 12 Februari 1979 dengan formatur terpilih Abdullah Hehamahua
14. Kongres ke-14 di Bandung pada tanggal 30 April 1981 dengan formatur terpilih Ahmad Zacky Siradj
15. Kongres ke-15 di Medan pada tanggal 26 Mei 1983 dengan formatur terpilih Harry Azhar Aziz
16. Kongres ke-16 di Padang pada tahun 1986, dengan formatur terpilih M. Saleh Khalid, terpecahnya HMI menjadi dua yakni HMI DIPO dan HMI MPO
17. Kongres ke-18, dengan formatur terpilih Ferry Mursyidan Baldan
18. Kongres ke-19, dengan formatur terpilih M. Yahya Zaini
19. Kongres ke-20, dengan formatur terpilih Taufik Hidayat
20. Kongres ke-21 di Yogyakarta, dengan formatur terpilih Anas Urbaningrum
21. Kongres ke-22 di Jambi, dengan formatur terpilih Fakhruddin
22. Kongres ke-23 di Pontianak, dengan formatur terpilih Cholis Malik
23. Kongres ke-24 di Jakarta, dengan formatur terpilih Hasanuddin
24. Kongres ke 25 di Makassar, dengan formatur Terpilih Fajar R Zulkarnaen
25. Kongres ke 26 di Palembang, dengan formatur terpilih Arip Musthopa
26. Kongres ke 27 Depok pada tanggal 5 - 10 November 2010, dengan formatur terpilih Noer Fadjriansyah. (Dokumen PB HMI).

*g. Kongres HMI MPO*

1. Kongres ke-16 di Yogyakarta pada tahun 1986, Ketua Umum : Eggy Sudjana
2. Kongres ke-17 di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 1988, Ketua Umum: Tamsil Linrung
3. Kongres ke-18 di Bogor pada tanggal 10 Oktober 1990, Ketua Umum: Masyhudi Muqarrabin
4. Kongres ke-19 di Semarang pada tanggal 24 Desember 1992, Ketua Umum : Agusprrie Muhammad
5. Kongres ke-20 di Purwokerto pada tanggal 27 April 1995, Ketua Umum : Lukman Hakim Hassan
6. Kongres ke-21 di Yogyakarta pada tanggal 28 Juli 1997, Ketua Umum: Imron Fadhil Syam
7. Kongres ke-22 di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 1999, Ketua Umum: Yusuf Hidayat
8. Kongres ke-23 di Makassar pada tanggal 25 Juli 2001, Ketua Umum: Morteza Syafinuddin Al-Mandary
9. Kongres ke-24 di Semarang pada tanggal 11 September 2003, Ketua Umum : Cahyo Pamungkas
10. Kongres ke-25 pada tanggal 17 Agustus 2005, Ketua Umum : Muzakkir Djabir
11. Kongres ke-26 di Jakarta Selatan pada tanggal 16 Agustus 2007, Ketua Umum : Syahrul Effendi Dasopang
12. Kongres ke-27 di Yogyakarta pada tanggal 9 Juni 2009, Ketua Umum : Muhammad Chozin Amirullah

13. Kongres ke-28 di Pekanbaru, Riau tanggal 14 - 19 Juni 2011, Ketua Umum : Alto Makmuralto. (Dokumen PB HMI).

*h. Fase-Fase Perkembangan HMI dalam Perjuangan Bangsa Indonesia*

Adapun fase perkembangan HMI dalam perjuangan Bangsa Indonesia dapat dikategorikan ke dalam delapan fase berikut ini (Sitompul 1978, hal. 38)\*:

*Pertama*, Fase Konsolidasi Spiritual (1946-1947), sebagaimana telah diterangkan di atas. *Kedua*, Fase Pengokohan (5 Februari 1947-30 November 1947). Selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, reaksi-reaksi terhadap kelahiran HMI barulah berakhir. Masa sembilan bulan itu dipergunakan untuk menjawab berbagai reaksi dan tantangan yang datang silih berganti, yang kesemuanya itu semakin mengokohkan eksistensi HMI sehingga dapat berdiri tegak dan kokoh. *Ketiga*, Fase Perjuangan Bersenjata (1947-1949). Seiring dengan tujuan HMI yang digariskan sejak awal berdirinya, maka konsekuensinya dalam masa perang kemerdekaan, HMI terjun ke gelanggang pertempuran melawan agresi yang dilakukan oleh Belanda, membantu Pemerintah, baik langsung memegang senjata bedil dan bambu runcing, sebagai staff, penerangan, penghubung. Untuk menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 18 September 1948, Ketua PPMI/ Wakil Ketua PB HMI Ahmad Tirtosudiro membentuk Corps Mahasiswa (CM), dengan Komandan Hartono dan wakil Komandan Ahmad Tirtosudiro, ikut membantu Pemerintah menumpas pemberontakan PKI di Madiun, dengan mengerahkan anggota CM ke gunung-gunung, memperkuat aparat pemerintah. Sejak itulah dendam kesumat PKI terhadap HMI tertanam. Dendam disertai benci itu nampak sangat menonjol pada tahun '64-'65, di saat-saat menjelang meletusnya G 30 S/PKI.

---

\* Dapat dilihat juga dalam PB HMI, *HMI Sepanjang Jalan* (Yogyakarta: Departemen Penerangan PB HMI, 1975), hal. 33.

*Keempat*, Fase Pertumbuhan dan Perkembangan HMI (1950-1963). Selama para kader HMI banyak yang terjun ke gelanggang pertempuran melawan pihak-pihak agresor, selama itu pula pembinaan organisasi terabaikan. Namun hal itu dilakukan secara sadar, karena itu semua untuk merealisasikan tujuan dari HMI sendiri, serta dua tugasnya yakni tugas Agama dan tugas Bangsa. Maka dengan adanya penyerahan kedaulatan Rakyat tanggal 27 Desember 1949, mahasiswa yang berniat untuk melanjutkan kuliahnya bermunculan di Yogyakarta. Sejak tahun 1950 dilaksanakanlah tugas-tugas konsolidasi internal organisasi. Disadari bahwa konsolidasi organisasi adalah masalah besar sepanjang masa. Bulan Juli 1951 PB HMI dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta.

*Kelima*, Fase Tantangan (1964-1965). Dendam sejarah PKI kepada HMI merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi HMI. Setelah agitasi-agitasinya berhasil membubarkan Masyumi dan GPII, PKI menganggap HMI adalah kekuatan ketiga umat Islam. Begitu bersemangatnya PKI dan simpatisannya dalam membubarkan HMI, terlihat dalam segala aksi-aksinya, Mulai dari hasutan, fitnah, propaganda hingga aksi-aksi riil berupa penculikan, dsb. Usaha-usaha yang gigih dari kaum komunis dalam membubarkan HMI ternyata tidak menjadi kenyataan, dan sejarahpun telah membeberkan dengan jelas siapa yang kontra revolusi, PKI dengan puncak aksi pada tanggal 30 September 1965 telah membuatnya sebagai salah satu organisasi terlarang.

*Keenam*, Fase Kebangkitan HMI sebagai Pelopor Orde Baru (1966 - 1968). HMI sebagai sumber insani bangsa turut memelopori tegaknya Orde Baru untuk menghapuskan orde lama yang sarat dengan ketotaliterannya. Usaha-usaha itu tampak antara lain HMI melalui Wakil Ketua PB Mari'ie Muhammad memprakasai Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) 25 Oktober 1965 yang bertugas antara lain: 1) Mengamankan Pancasila. 2) Memperkuat bantuan kepada ABRI dalam penumpasan Gestapu/ PKI sampai ke akar-akarnya. Masa aksi KAMI yang pertama berupa Rapat Umum

dilaksanakan tanggal 3 Nopember 1965 di halaman Fakultas Kedokteran UI Salemba Jakarta, dimana barisan HMI menunjukkan superioritasnya dengan massanya yang terbesar. Puncak aksi KAMI terjadi pada tanggal 10 Januari 1966 yang mengumandangkan tuntutan rakyat dalam bentuk Tritura yang terkenal itu. Tuntutan tersebut ternyata mendapat perlakuan yang represif dari aparat keamanan sehingga tidak sedikit dari pihak mahasiswa menjadi korban. Di antaranya antara lain : Arif rahman Hakim, Zubaidah di Jakarta, Aris Munandar, Margono yang gugur di Yogyakarta, Hasannudin di Banjarmasin, Muhammad Syarif al-Kadri di Makasar, kesemuanya merupakan pahlawan-pahlawan ampera yang berjuang tanpa pamrih dan semata-mata demi kemaslahatan ummat serta keselamatan bangsa serta negara. Akhirnya puncak tuntutan tersebut berbuah hasil yang diharap-harapkan dengan keluarnya Supersemar sebagai tonggak sejarah berdirinya Orde Baru.

*Ketujuh*, Fase Pembangunan (1969-1970). Setelah Orde Baru mantap, Pancasila dilaksanakan secara murni serta konsekuen (meski hal ini perlu kajian lagi secara mendalam), maka sejak tanggal 1 April 1969 dimulailah Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). HMI pun sesuai dengan 5 aspek pemikirannya turut pula memberikan sumbangan serta partisipasinya dalam era awal pembangunan. Bentuk-bentuk partisipasi HMI baik anggotanya maupun yang telah menjadi alumni meliputi di antaranya: 1) partisipasi dalam pembentukan suasana, situasi dan iklim yang memungkinkan dilaksanakannya pembangunan, 2) partisipasi dalam pemberian konsep-konsep dalam berbagai aspek pemikiran 3) partisipasi dalam bentuk pelaksana langsung dari pembangunan.

*Kedelapan*, Fase Pergolakan dan Pembaruan Pemikiran (1970-sekarang). Suatu ciri khas yang dibina oleh HMI, di antaranya adalah kebebasan berpikir di kalangan anggotanya, karena pada hakikatnya timbulnya pembaharuan karena adanya pemikiran yang bersifat dinamis dari masing-masing individu. Disebutkan bahwa fase pergolakan

pemikiran ini muncul pada tahun 1970, tetapi gejala-gejalanya telah nampak pada tahun 1968. Namun klimaksnya memang terjadi pada tahun 1970 di mana secara relatif masalah- masalah intern organisasi yang rutin telah terselesaikan. Sementara di sisi lain, persoalan ekstern muncul menghadang dengan segudang problema. Pada saat itu HMI di bawah kepemimpinan Nurcholish Madjid.

### **Ideologi HMI**

HMI dalam banyak hal sepertinya dapat digolongkan di dalam gerakan Muslim dengan corak modern. Tentang hal ini Gibb (1947) dalam Tanja (1991, hal. 105) melukiskannya sebagai organisasi-organisasi yang walaupun bertolak dari suatu wawasan keagamaan yang bersifat baru, namun tidak menggarap dasar ajaran yang tegas dan membela warisan ke-Islaman terutama melalui cara-cara politik. Berdasarkan hal ini, maka sejak awal HMI telah menunjukkan adanya gaya gabungan tertentu bagi organisasi-organisasi seperti *Masyumi* dan kemudian *Parmusi* serta *Muhammadiyah*. Seperti *Jong Islamieten Bond* sebelum perang, HMI terutama terdiri dari para mahasiswa dengan latar belakang kota yang memasuki lembaga-lembaga pendidikan sekuler di sekolah tinggi. Menurut Gibb, mereka ini “termasuk orang-orang yang berminat, dan terkadang sangat berminat terhadap agamanya, tetapi yang dalam berbagai hal tidak senang dengan asas-asas kepercayaan tradisional dan dengan desakan pandangan kaum kolot tentang kesucian lembaga-lembaga kemasyarakatan tradisional di dalam dunia Muslim”. (Tanja 1991, hal. 105).

Namun demikian dalam perkembangan terakhir, sangat banyak jumlah mahasiswa dari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan Islam yang menjadi anggota HMI dan berhasil mendaki jenjang kepemimpinan organisasi, seperti Nurcholish Madjid, mantan ketua HMI. Hal ini juga berlaku bagi banyak mahasiswa dari IAIN di berbagai kota-kota besar. Pada masa kepemimpinan Nurcholish Madjid inilah, HMI

secara nasional mampu menghasilkan suatu dasar asasi yang kukuh bagi organisasinya terutama untuk menjawab dengan tepat masalah-masalah pembaruan keagamaan di dalam umat. (Tanja 1991, hal. 105-106).

*a. Asas-Asas Dasar Wawasan Keagamaan HMI*

Dalam beberapa kalimat yang dirumuskan dan disusun paling baik ialah *Nilai-Nilai Dasar Perjuangan* yang dihasilkan selama kongres HMI ke-9 pada tahun 1969, kedudukan keagamaan dan ideologi HMI secara resmi yang dirumuskan oleh Nurcholish Madjid dan Sakib Mahmud. Pokok masalah pertama yang ditangani ialah dasar kepercayaan. Diakui sebagai kenyataan bahwa kepercayaan, atau iman adalah hakiki bagi peradaban dan tak terelakkan bagi manusia. Tetapi walaupun keimanan ini memberikan kebenaran, namun ia pun melahirkan tradisi-tradisi demikian membelit masyarakat dan dengan tegas menolak perubahan. Oleh karena itu, sayang sekali bila harus melawan kemajuan. Tampaknya jalan keluar dari problema ini ialah bahwa bagaimanapun masyarakat harus membebaskan tradisi-tradisi yang menghambat kemajuan dan kembali kepada keimanan semula yang ditegaskan oleh Allah atau petunjuk sejati. Kalimat *syahadat* yang pertama-“Tidak ada Tuhan melainkan Allah”-mengandung pengertian baik penyangkalan maupun pengecualian. Kalimat “Tak ada Tuhan”, menyangkali semua kepercayaan palsu; sedangkan kalimat “melainkan Allah” adalah pengecualian yang diperuntukkan bagi kepercayaan yang benar terhadap Allah. (NDP HMI, hal. 5-10).

Dengan menyangkali semua kepercayaan palsu, manusia membebaskan dirinya sendiri dari ikatan tradisi. Sedangkan dengan memberikan pengecualian bagi yang benar, manusia menyerahkan dirinya kepada Allah, itulah arti hakiki Islam. Manusia memiliki bermacam-macam jalan, termasuk pendekatan terhadap Tuhan secara *intuitif*, secara ilmiah, secara menyejarah, secara pengalaman; tetapi dalam keterbatasannya manusia tidak dapat dengan kesanggupannya sendiri benar-benar menangkap hakikat

Yang Maha Esa itu. Untuk ini manusia memerlukan wahyu Tuhan yang tidak diberikan kepada setiap umat manusia, tetapi hanya kepada orang-orang suci tertentu yang terpilih sebagai rasul (utusan) dan nabi. Garis sejarah para rasul dan nabi sepanjang zaman merentang dari nabi Adam kepada Nuh kepada Ibrahim kepada Musa kepada Isa, putra Mariam, memuncak dalam diri Muhammad SAW nabi dan rasul terakhir sepanjang masa.(NDP.HMI., hal.7).

Wahyu terakhir Tuhan diberikan kepada nabi Muhammad dan tertulis di dalam Al-Qur'an. Qur'an berarti bacaan, tetapi juga kumpulan segala keterangan mengenai segala hal-ihwal, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat, termasuk manusia dan alam semesta. Agar memperoleh pemahaman yang benar tentang Tuhan yang satu-satunya itu, orang harus berpegang kepada Al-Qur'an dan mengakui kerasulan serta kenabian Muhammad. Manusia adalah makhluk Tuhan yang tertinggi, puncak ciptaannya; Allah menjadikannya sebagai khalifah bagi-Nya, atau wali-pengganti di atas bumi, dan diamanatkan segala masalah duniawi kepadanya. (NDP.HMI., hal. 9).

Karena itu manusia dikuasakan bertanggung jawab penuh atas segala apa yang dilakukannya di atas bumi; dia adalah pembuat sejarahnya sendiri. Pada akhirnya hukum alam Tuhan, seperti hukum sebab-akibat dan hukum gaya berat, yang bersifat pasti itulah yang menguasai sejarah maupun alam semesta. (NDP.HMI., hal. 9).

Namun demikian manusia diberi kebebasan memilih untuk taat atau tidak taat kepada hukum-hukum moral Tuhan itu. Hukum dasar bagi segala sesuatu yang duniawi dan menyejarah ialah perubahan dan perkembangan. Hanyalah Tuhan sebagai Khalik atas segala yang dapat tetap sama sepanjang masa. Untuk memenuhi tugas sejarahnya ini, manusia harus selalu dalam persesuaian dengan perkembangan ke arah kebenaran. Akhir sejarah atau akhir kehidupan di dunia ini dinamakan *yaum al-din* (hari kiamat), pada saat Tuhan akan menyatakan diri sebagai Pemilik dan Penguasa atas segala. Sesudah paripurna, semua segi kehidupan yang menyejarah itu pun berakhir, termasuk

kebebasan, kegiatan, kemasyarakatan, segala hal-ihwal yang telah dikenal manusia itu. Walaupun demikian manusia diamanatkan dengan tanggung jawab di hadapan peradilan Ilahi pada zaman itu tentang segala apa yang telah diperbuatnya selama kehidupan duniawi mereka. Untuk mengenali dengan kemampuan sendiri tentang apa yang akan terjadi di dunia mendatang adalah di luar kekuasaan manusia; pengetahuan seperti itu hanya akan datang melalui wahyu yang diterima dengan perantaraan keimanan. (NDP.HMI., hal. 9-10).

Masalah pokok berikut yang dibicarakan adalah berkenaan dengan masalah-masalah kemanusiaan. Sebagai khalifah Tuhan di muka bumi, manusia akan cenderung kepada kebenaran. (NDP.HMI., hal. 10). Hati nuraninya merupakan pemancar bagi keinginannya untuk melakukan kebenaran. Fitrahnya itu jugalah yang menyebabkan manusia berbeda dari makhluk-makhluk yang lain. Menuruti perintah-perintah hati nuraninya itu menyebabkan manusia hidup sesuai dengan fitrahnya dan oleh karenanya, ia menjadi benar dengan sendirinya. Manusia yang benar ialah mereka yang menangkap makna hidup dengan mengerjakan *'amal shalih*. ((NDP.HMI., hal. 11) atau perbuatan-perbuatan yang berkebaikan. Dengan demikian, kebahagiaan akan dapat ditemukan di dalam langkah maju yang dilaksanakan dengan perbuatan-perbuatan baik. Manusia yang benar ialah yang tangkas, panjang akal dan bijak dalam perbuatan baik yang dilakukannya, tidak picik, berpandangan luas dan penuh hasrat untuk mengikuti kebenaran ke manapun arahnya; dia pun penyabar, sopan dan pemaaf. Baginya kerjasama dengan kebahagiaan, ia pun selalu bergairah untuk melaksanakan tugasnya.\* Dia menyayangi sesama seperti juga terhadap dirinya sendiri, dan memelihara watak serta pribadi yang mengabdikan kejujuran dan keterusterangan dengan sebaik-baiknya terhadap orang lain. Minat perhatiannya berimbang antara jasmaniah dan yang

---

\* Mengenai kesamaannya dengan kedudukan kaum *Mu'tazilah* dalam teologi Islam klasik. Lihat w. Montgomery Watt, *Free Will and Predestination in Early Islam* (London: Luzac & Co., 1948), hal. 77.



rohaniah, antara orang-orang dan masyarakat. Orang seperti ini, berhati mulia dan suci, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan.

Mengenai masalah kemerdekaan, dikatakan bahwa tidak mungkin kejujuran tanpa kemerdekaan. Kehidupan memiliki dua sisi, *fana'* dan *baqa'*. Dalam hal yang pertama, orang harus melakukan perbuatan baik dan siap mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam segi yang kedua, orang tak berkesempatan lagi untuk melakukan perbuatan baik, hanyalah menunggu peradilan Tuhan sendiri sebagai pribadi. Pendek kata, manusia dilahirkan seorang diri, menjadi anggota masyarakatnya, dan sesudah mati ia seorang diri pula berhadapan dengan Tuhannya. Oleh karena itu, kepribadian manusia merupakan kenyataan dasar perikemanusiaan, yang di atasnyalah nilai-nilai kemanusiaan berpangkal. (NDP.HMI., hal. 13-15).

Sebagai pribadi, manusia harus memikul tanggung jawab atas perbuatannya; maka dari itu kemerdekaan pribadi adalah hak utama dan asasi bagi manusia. Sebagai makhluk sosial, di lain pihak, maka harus mempergunakan kemerdekaannya itu tanpa merugikan manusia lain. Lebih lanjut kemerdekaannya itu dibatasi oleh hukum alam Tuhan yang menguasai alam semesta termasuk manusia. Karena dikuasai oleh hukum alam Tuhan itu, maka manusia harus mentaati hukum itu. Masalahnya ialah, akankah ketaatannya itu membabi buta tak ikhlas ataukah dengan mata tajam dan ikhlas. (NDP.HMI., hal. 13-15).

Orang yang taat membabi buta tidak menggunakan hukum alam itu dengan ketajaman pikiran, tetapi orang yang taat dengan ikhlas berusaha dengan tanggung jawab untuk hidup sejalan dengan hukum alam itu melalui *ijtihad* atau pertimbangan yang bebas. Hanya dengan ketaatan yang dipilih secara bebas. (NDP.HMI., hal. 13-15).

Demikianlah orang akan menemukan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Pemberi hukum alam ini sudah barang tentu menurut ajaran Islam itu, ialah Tuhan yang

menuntut tidak sekedar ketaatan terhadap hukum alam yang tidak berpribadi, tetapi juga menuntut perbuatan-perbuatan baik sebagaimana telah dikemukakan di atas dan di atas segala-galanya, menuntut penyerahan diri kepada Dia secara pribadi.\* Ketundukan yang seolah-olah bertentangan seperti inilah arti asasi kemerdekaan manusia. Sebab jika kemerdekaan merangkum arti berbakti kepada kebenaran, maka ujung daripadanya ialah Tuhan yang merupakan Kebenaran Mutlak itu. Muslim sejati terutama disifatkan oleh ketaatannya itu yang dengan sendirinya akan membimbingnya menyembah dan mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu, atau bertauhid. (NDP.HMI., hal. 13-15).

Dengan hidup di dalam semangat tauhid orang akan mencapai kehidupan berimbang, bebas dari bahaya terbelahnya pribadi dan bebas untuk mengabdikan kepada Tuhan dan melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Lawan dari tauhid adalah syirik yang secara harfiah berarti “memberikan sekutu kepada Tuhan”. Syirik juga berarti membabi buta patuh kepada hal-hal yang bertentangan terhadap kebenaran dan dengan demikian menjadi tidak beriman. Dengan demikian merupakan dosa paling berat yang disandang manusia, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama manusia. (Watt 1970, hal. 150). Orang yang melakukan syirik diperbudak oleh pamrih manusiawi semata-mata.

Berkenaan dengan masyarakat, manusia adalah makhluk sosial namun tetap merdeka; kemerdekaan pribadi terwujud di dalam masyarakat. Karena pribadi-pribadi di dalam masyarakat itu merdeka, maka bermacam-macam pengelompokan sosial dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda pun terjadi. Bermacam-macam, berarti bahwa pribadi-pribadi dalam masyarakat harus mempunyai kemerdekaan memilih sepenuhnya untuk memperkembangkan bakat dan pengetahuannya di bidang-bidang yang paling cocok bagi masing-masing pribadi itu. Bagaimanapun juga kemerdekaan

---

\* Sidi Gazalba menghubungkan perkataan penyerahan dengan perkataan keselamatan, yang di dalam bahasa Arab kedua-duanya berasal dari akar yang sama: Sidi Gazalba, *Modernisasi Dalam Persoalan. Bagaimana Sikap Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 40.

pribadi yang mengajari anti-sosial itu akan menimbulkan nafsu dan kekacauan, yang membahayakan bagi pribadi maupun bagi masyarakat. Untuk menjaga dari hal itu, masyarakat menegakkan sistem-sistem peradilan yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua anggota masyarakat. (NDP.HMI., hal. 19-21).

Dengan terjaminnya keadilan maka kemerdekaan asasi pribadi dapat ditempatkan pada kedudukan yang setara dengan kepentingan-kepentingan sosial pribadi-pribadi yang lain. Untuk membangun masyarakat yang adil harus terdapat sekelompok orang yang karena bakat dan kecakapannya yang istimewa, disertai kekuasaan. Diperlengkapi dengan rasa kemanusiaan yang mendalam, orang-orang ini akan menjadi pemimpin masyarakat, terutama pemangku-pemangku jabatan pemerintahan yang diberi wewenang untuk melindungi hak-hak penduduk biasa. Namun demikian semua pribadi-pribadi itu, sebagai anggota masyarakat, masing-masing mempunyai kewajiban terhadap masyarakat. Oleh karenanya sistem pemerintahan yang ideal ialah demokrasi, suatu pemerintahan yang dibentuk oleh, dari dan untuk rakyat. (NDP.HMI., hal. 19-21).

Melindungi keadilan merupakan tugas setiap pemerintah, bukan hanya melindungi hak-hak rakyat semata tetapi juga untuk memimpinya ke arah pengetahuan yang benar tentang Tuhan sebagai Kebenaran Mutlak dan tentang rasul seperti guru kebenaran. Karena itu pemerintah yang benar harus ditaati dan dijunjung, karena dia mengabdikan kepada kemanusiaan, kebenaran dan Tuhan. (NDP.HMI., hal. 19-21).

Daerah paling penting di mana keadilan harus diwujudkan ialah bidang kehidupan perekonomian. Di sini keadilan berarti pembagian kekayaan yang sama dikalangan anggota masyarakat. Di dalam masyarakat yang ketiadaan keadilan, di sana tak terdapat pula persamaan di antara sesama manusia, dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin pun terbentang lebar. Jika suatu pemerintahan gagal mencapai dan

memelihara keadilan dalam masyarakat, maka pemerintahan yang demikian telah mengingkari pengabdian yang semestinya kepada Tuhan. (NDP.HMI., hal. 19-21).

Pemerintah pada suatu masyarakat kapitalis merupakan lambang kejahatan ekonomi, yang demikian itu; mengajar manusia untuk menumpuk kekayaan tanpa memperhatikan kepentingan manusia lain. Oleh karena itu, mencapai keadilan berarti melenyapkan segala bentuk kapitalisme. Kapitalisme berjalan bertentangan dengan kehendak Tuhan sebagaimana ditunjukkan oleh kalimat Al-Qur'an '*amar ma'ruf, nahi munkar* atau *al-nahyu 'an al-munkar wa al-amr bi al-ma'ruf*.\* Mereka yang menimbun kekayaan itu bisa saja mengaku sebagai percaya kepada Tuhan, tetapi kenyataannya menginjak-injak hak orang lain, adalah bertentangan dengan kehendak Tuhan. (NDP.HMI., hal. 21-27).

Untuk memanggil orang semacam ini diperlukan bentuk pendidikan yang tepat, yang terdapat di dalam shalat orang diingatkan untuk menepati fitrahnya, bahwa orang diciptakan untuk mengejar kebenaran dan keadilan serta percaya kepada Tuhan. Melalui shalat orang menyadari ketergantungannya kepada rahmat Tuhan dan dengan demikian maka ia akan selalu menjalankan apa-apa yang baik, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Untuk mewujudkan gagasan ini di dalam kenyataan, zakat harus dilaksanakan, karena hal ini merupakan jalan paling baik untuk melenyapkan perbedaan antara si kaya dan si miskin. (NDP.HMI., hal. 21-27).

Mengenai hubungan antara kemanusiaan dengan ilmu pengetahuan, dikatakan bahwa hakikat kemanusiaannya yang luhur ialah iman dan amal saleh. Melalui iman manusia mencari Tuhan sebagai tujuannya yang terakhir; ia dengan giat mencari kebenaran untuk menyumbangkan sejarah umat manusia. Di dalam sejarah inilah manusia melakukan amal salehnya itu. Dengan watak yang demikian orang seperti ini

---

\* *Amar ma'ruf nahi munkar* berarti "memerintahkan apa yang terjadi dan menjauhi apa yang dilarang" seperti diutarakan oleh Boland dalam Tanja (1991, hal. 126) tentang penjelasan artinya dalam berbagai ayat Qur'an serta penerapannya menurut berbagai tradisi.

akan mencintai kebenaran dan berjuang untuk itu selama hayat dikandung badan. Walaupun kebenaran yang ada sekarang ini nisbi, namun akan membawa manusia kepada Tuhan, Kebenaran Asasi. (NDP.HMI., hal. 27-28).

Gerak ke arah kebenaran itu bersifat maju, dan berdasarkan itulah maka orang harus menjadi dinamis dan bebas dari tradisionalisme yang berlaku umum. Untuk mencapai kebenaran dan membangun sejarah diperlukan ilmu pengetahuan. Dengan menggunakan akal sehat dan dipimpin oleh hati nurani, orang akan memperoleh kebenaran yang tepat dan kebenaran ini akan memerintahnya untuk berbuat baik dan memperhatikan kepentingan manusia sesamanya. (NDP.HMI., hal. 27-28).

#### *b. Berjuang Untuk Pembaruan Pikiran Ideologi*

Supaya terdapat persesuaian dengan masalah pembaruan keagamaan, maka sangat penting mengemukakan tulisan-tulisan Nurcholish Madjid dan Deliar Noer. Karena tulisan-tulisan mereka berdua dipandang sebagai uraian tentang kedudukan ideologi HMI yang telah secara resmi diterima. Perlu ditelaah pertama karya Deliar Noer,\* karena tulisan ini menggarap masalah “cendikiawan ulama dan ulama cendikiawan” yang dari sejak semula menjadi cita-cita para anggota HMI dan yang telah menjadi tantangan untuk dicapai melalui segala program dan kegiatan HMI. Di dalamnya Deliar Noer memulai dengan tinjauan yang agak panjang-lebar mengenai melenturnya para cendikiawan muda Muslim dari ajaran Islam sebagai akibat lamanya mereka berada di bawah asuhan pendidikan sekuler. Menurut pendapatnya masalah ini pernah dihadapi *Jong Islamieten Bond*, namun masih juga dihadapi oleh HMI. Terdapat empat akibat pokok, Noer mengatakan, terjadi pada kehidupan beragama di kalangan cendikiawan muda Muslim. *Pertama*, disebabkan oleh pendidikan sekuler yang bersikap netral terhadap gagasan-gagasan keagamaan itu, maka mereka menjadi renggang dari Islam.

---

\* Deliar Noer, *Masalah Ulama Intelektuil atau Intelektuil Ulamasuatu tesis untuk Generasi Muda Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

Mereka cenderung menjadi acuh tak acuh terhadap ajaran Islam dan enggan pula terhadap syariat-syariat agama. *Kedua*, para mahasiswa Muslim ini memandang Islam tidak relevan dengan tuntutan zaman, dan pandangan bahwa Kristen (baik Protestan maupun Katolik Roma) sebagai agama yang modern dan maju yang sesuai dengan harapan masa kini mereka. *Ketiga*, pendidikan sekuler tersebut telah menimbulkan perpecahan di kalangan angkatan muda Muslim, antara yang acuh tak acuh dengan syariat Islam dengan mereka yang berpendidikan apa pun tetapi masih mentaati ajaran-ajaran Islam. Dan *keempat*, karena di Jawa selalu terdapat kecenderungan ke arah percampuran keagamaan, kehadiran mereka pada pendidikan sekuler telah menimbulkan perpecahan yang lebih mendalam antara golongan Muslim campuran dengan mereka yang mendambakan pemurnian syariat-syariat agama dari segala macam perusakan. (Noer 1974, hal. 10).

Dengan faktor-faktor tersebut di atas, maka kaum Muslim Indonesia menjumpai kesatuan umat yang terkoyak meskipun segala usaha untuk memperbaikinya telah dilakukan. Malahan dengan dimasukkannya mata pelajaran agama di sekolah-sekolah dan universitas sekuler pun tidak menolong keadaan. Menjadi keinginan dan harapan Deliar Noer bahwa HMI akan dapat mewujudkan gagasannya tentang cendekiawan muda Muslim. Lebih lanjut, ia mengingatkan para mahasiswa Muslim tentang bahaya terseret ke dalam kancah perjuangan kekuatan-kekuatan politik yang telah berulang kali mengancam kehidupan negara. (Noer 1974, hal. 11).

Tidak dapat dipungkiri, memang harapan untuk ikut menikmati kekuasaan politik menjadi godaan kuat bagi organisasi-organisasi keagamaan maupun organisasi-organisasi politik. Seperti halnya organisasi politik dan sosial Islam lainnya, HMI pun terseret di dalam orbit kekuatan yang demikian. Dia berpendapat, HMI sebagai organisasi mahasiswa Muslim yang besar, harus mempertahankan ciri keagamaannya yang bebas demi keutuhannya sendiri. (Noer 1974, hal. 11).

Untuk membangun kebebasan dalam program, sebagai pemecahan terhadap masalah HMI itu sendiri, Noer mengajukan lima usul sebagai berikut: *Pertama*, mendidik para anggotanya untuk menempatkan politik dalam hubungan yang sebenarnya dengan menitikberatkan, terutama bagi kalangan mahasiswa-calon-calon pemimpin di masa depan – masalah kemasyarakatan dan kebudayaan semacam itu, seperti pendidikan, perdagangan, dan industri serta keahlian-keahlian. *Kedua*, menyibukkan diri dengan telaah yang giat atas ajaran-ajaran Islam agar dapat menjadikannya sebagai kekuatan pembimbing bagi kehidupan nasional. *Ketiga*, mengembangkan tanggapan maju terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat kekuatan yang harus digenggam oleh tangan orang-orang terpelajar yang mengabdikan diri bagi pemerintahan rakyat yang jujur. *Keempat*, mengajarkan terus-menerus pengetahuan secara keserjanaan layak dan lengkap tentang sejarah Islam, terutama di Indonesia, supaya tumbuh pengertian tentang identitas yang tidak boleh tidak harus dimiliki kalangan mahasiswa Muslim, untuk membangun bangsa di atas warisan keagamaan yang paling luas itu. *Kelima*, mempelajari atau setidaknya tahu bahasa Arab, tidak hanya sebagai bahasa Al-Qur'an, tetapi juga sebagai penyumbang paling besar terhadap perbendaharaan kata bahasa Indonesia. (Noer 1974, hal. 12-14).

Deliar Noer yakin bahwa identifikasi sesuatu bangsa dengan agama yang dianut oleh bagian terbesar dari penduduknya merupakan kunci untuk mempersatukan bangsa ini. Oleh karena itu, menurut pendapatnya, kekuatan Indonesia sebagai suatu bangsa terletak pada identifikasinya dengan Islam. Hanyalah orang-orang Muslim, Noer berpendapat, yang berusaha keras untuk membangun bangsa di atas dasar ke-Islaman itu yang mempunyai kemungkinan untuk dapat menjadi cendekiawan ulama dan ulama cendekiawan. Dalam memperbincangkan masalah ini, Noer telah mengajukan suatu cara pemecahan yaitu dengan pembaruan ideologi di dalam umat, terutama dalam artian

politik, yang tidak menuntut adanya pemahaman baru apa pun dalam hal rumusan-rumusan keagamaan. (Noer 1974, hal. 12-14).

Tulisan Nurcholish Madjid sama sekali berlainan dengan tulisan Deliar Noer. Sebab Nurcholish tidak dididik sebagai seorang ahli politik. Ia lulusan IAIN yang mendalami sastra Arab. Sebagai seorang penggemar sastra, dalam menulis karyanya itu Madjid bermaksud untuk memberikan renungan-renungan spontan terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan keagamaan. Sebagai dasar gagasan-gagasan pembaruannya, dia telah banyak menggunakan rumusan-rumusan keagamaan. Dalam tulisannya yang pertama *Modernisasi Adalah Rasionalisasi Bukan Westernisasi* (1968), ia memperingatkan umat Islam terhadap bahaya sekulerisme. Dikatakannya, bahwa sekulerisme tidak hanya merusak kepercayaan asasi Islam, tetapi juga membahayakan bagi Pancasila – terutama sila pertama – sebagai ideologi resmi Negara Indonesia. Menurut pendapatnya, pernyataan tertinggi sekulerisme ialah ideologi komunis, terutama penolakannya untuk mengakui adanya Tuhan dan untuk menganut kepercayaan pada-Nya semata. (Tanja 1991, hal. 115).

Dalam menjawab manakah yang lebih berbahaya bagi Islam, komunisme atau nazisme, dengan terus-terang ia menjawab komunisme lebih berbahaya dari nazisme, karena nazisme masih percaya kepada Tuhan. Jika ia berbicara masalah-masalah ideologi itu, dia ada dalam posisi membela Islam terhadap tuduhan Islam menentang ilmu pengetahuan modern. Pembelaannya mewakili pandangan yang lazim dimiliki oleh kaum Muslim pembaru di Indonesia. Ia juga berbicara tentang perlunya membawa HMI menjadi lebih dekat kepada umat, perlunya mencari pimpinan yang sangat paham tentang ajaran-ajaran Islam, HMI dengan mudah dapat terperosok ke dalam sekularisme, kehilangan arah; dan dengan kegagalan pimpinan akan mempermudah terjadinya perpecahan di dalam umat. Dengan mempertahankan rasionalisasi tanpa westernisasi, Madjid meraih kepemimpinan atas HMI yang disokong dengan



bersemangat oleh arus umum kaum pembaru, sedangkan pihak muslim tradisional menamakannya sebagai Muhammad Natsir muda. Namun demikian banyak orang terkejut ketika dua tahun sesudah karangannya itu terbit, dengan radikal Madjid mengubah pikirannya mengenai beberapa persoalan pokok sehingga menimbulkan kegemparan di kalangan banyak pembaharu, termasuk beberapa orang bekas pemimpin HMI sendiri. (Tanja 1991, hal. 116).

Banyak yang mengatakan, bahwa perubahan pikirannya tersebut pada pokoknya diakibatkan oleh usaha kaum Muslimin untuk menyatukan semua kalangan partai politik Islam, hal yang menuntut kompromi serta akan berarti suatu garis politik yang lebih konservatif untuk menghadapi pemilihan umum 1971. Menggeser ke sifat konservatif demikian akan merenggangkan golongan muda dari partai-partai politik Islam yang ada. Kompromi politik demikian dijalankan sedemikian rupa tanpa membuang asas-asas hakiki atau “menyesuaikan iman kepada empirisme”. Dan menurut Tanja (1991, hal. 116) dalam percakapan pribadi Madjid membenarkan penilaian tersebut.

Tulisan Madjid yang lain, *Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam Dan Masalah Integrasi Ummat* (1970). Dalam karangannya ini, Madjid menegaskan bahwa umat Islam di Indonesia pada kala itu telah jatuh kembali di dalam situasi stagnasi (*kejumudan*), dalam cara berpikir mereka dan dalam cara mereka mengembangkan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu ia yakin, bahwa umat Islam telah kehilangan “daya gerak-psikologis” mereka. Oleh karena itu, jika kaum Muslimin berusaha hendak memelihara umat, mereka ditantang untuk memilih di antara dua; pembaharuan diri atau gagasan-gagasan kolot. Pilihan pertama mungkin akan berakibat terpecahnya umat, dan pilihan pada yang kedua menimbulkan stagnasi intelektual dan hilangnya kekuatan modal Islam. Sejarah telah menunjukkan, demikian pendapat Madjid, bahwa sesuatu

langkah pembaruan yang bagaimanapun harus diambil dalam menghadapi tantangan keras dari mereka yang lebih menginginkan *status quo*. (Tanja 1991, hal. 116-117)

Bagi Madjid, Qur'an dan Hadis harus lebih banyak dipandang sebagai pedoman umum untuk ditafsirkan secara progresif sesuai dengan hukum perubahan dan perkembangan. Perubahan-perubahan itu, seperti Madjid telah menunjukkan tetap berada di dalam haluan-haluan ke-Islaman selama hal itu senada dengan semangat tauhid yang menurut pendapat Madjid, akan menimbulkan sikap pemahaman dan pengakuan atau taqwa tentang adanya Tuhan, sesuatu hal yang diperlukan demi kesejahteraan umat manusia. Lebih lanjut ia katakan pembaharuan yang terus-menerus harus menjadi acara sehari-hari bagi semua kaum Muslimin yang beriman. Karena pembaruan harus dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan intelektual cukup luas, maka kaum intelektual Muslim seperti anggota-anggota HMI harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam melaksanakannya. (Tanja 1991, hal. 116-117)

Dalam karangannya yang lain, Madjid melanjutkan serangannya terhadap stagnasi semua gerakan Islam di dalam negeri, bagi kaum tradisionalis maupun kaum pembaru. Disalahkannya mereka karena sikapnya mengucilkan diri. Mereka harus dapat berhubungan dengan golongan-golongan lain yang bukan Islam. Lebih dari itu, organisasi-organisasi Islam harus lebih banyak menitikberatkan kepada unsur-unsur universal di dalam Islam, dengan demikian memungkinkan mereka untuk bekerjasama dengan golongan lain yang didasari oleh oleh cita-cita keagamaan yang berbeda. Menurutnya gagasan Islam *amar ma'ruf nahi munkar* telah diterapkan oleh kaum Muslimin secara tidak jujur, yakni yang terlalu menekankan anak-kalimat *nahi munkar* yang dekonstruktif dan legalistik, menjauhi terhadap apa yang tak terpuji, dan mengabaikan *amar ma'ruf* atau memerintahkan apa yang terpuji. (Tanja 1991, hal. 118)

Dalam usahanya menggarap lebih sempurna apa yang dimaksud sekularisasi, Madjid menulis karangan lain berjudul *Sekali Lagi Tentang Sekularisasi*. Di dalam karangan ini, setelah memperbincangkan kembali arti sekularisasi dalam hubungannya dengan konsep-konsep Qur'an dan Hadis tentang khalifah dan tauhid, Madjid lebih banyak menambahkan pada alasannya dengan konsep-konsep Qur'an seperti nama-nama Tuhan, *al-rahman* (Yang Maha Pengasih) dan *al-rahim* (Yang Maha Penyayang), dan perbedaan antara *yaum al-dunya*, atau Hari Dunia, dan *yaum al-din* (hari kiamat). Dan seterusnya. (Tanja 1991, hal. 118).

Masih ada lagi tulisan Madjid lainnya yang pantas diperhatikan, yaitu *Menyegarkan Kembali Faham Keagamaan di Kalangan Ummat di Indonesia* (1972). Dalam sebagian besar karangannya ini, Madjid memperbincangkan doktrin-doktrin ke-Islaman tentang iman, amal saleh dan taqwa, yang pada dasarnya merupakan pembahasan yang sama mengenai istilah-istilah tersebut seperti yang telah dikemukakannya terdahulu kepada HMI. Betapa pun juga karangan ini mempunyai arti yang jauh lebih penting karena pembahasannya masalah pembentukan Negara Islam yang sangat peka bagi bangsa Indonesia itu. Menurut pandangannya yang argumentatif, gagasan Negara Islam yang konon berdasarkan Qur'an itu bukan saja sudah usang tetapi juga bukan gagasan Islam, karena ajaran Islam yang benar menyatakan bahwa pembentukan suatu lembaga kerohanian dan kekuasaan, seperti misalnya kependetaan (*rahbaniyyah*), adalah terlarang. Menurutnya, daya upaya menegakkan suatu Negara yang demikian berarti mempertautkan sifat *lalhi* (berlebihan) kepada lembaga keduniawian yang pada analisa terakhirnya adalah syirik. (Tanja 1991, hal. 116-117)

Tulisan-tulisan yang telah diungkapkan di atas, merupakan konstruksi pemikiran yang melatarbelakangi penyusunan NDP HMI, karena ide-ide yang terdapat dalam tulisan-tulisan tersebut dijadikannya sebagai pondasi dan ide-idenya itu pula yang menuntutnya untuk merumuskan 7 tema pokok NDP HMI. Walaupun demikian, karya-

karya tersebut barulah menunjukkan tingkat “adaptasi pemikiran” dari nilai-nilai Islam terhadap modernisme, mengikuti tren kebijakan pemerintah Orde Baru. Yang mana pada masa itu para cendekiawan Muslim, terutama dari kalangan mudanya sedang berjuang keras agar ajaran-ajaran Islam bisa dikatakan “sesuai” dengan pemikiran dan perkembangan moderen.

## **Bab 5**

### **PENUTUP**

#### **Simpulan**

Dari uraian terdahulu dan sekaligus sebagai jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. NDP HMI secara historis muncul karena kebutuhan terhadap buku saku organisasi. NDP ini mencakup *tema pokok*; NDP HMI secara historis muncul karena kebutuhan terhadap buku saku organisasi. NDP ini mencakup *tema pokok*; *pertama*, tentang Dasar-Dasar Kepercayaan; *kedua*, mengenai Pengertian-Pengertian Dasar tentang Kemanusiaan; *ketiga*, mengenai Universalisme Islam dan Kebebasan Berusaha; *keempat*, mengenai Ketuhanan yang Maha Esa dan Perikemanusiaan; *Kelima*, mengenai Individu dan Masyarakat; *keenam*, tentang Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi; *ketujuh*, tentang Kemanusiaan dan Ilmu Pengetahuan. Atau secara sederhana dapat dikatakan pemikiran Cak Nur dalam NDP HMI itu merupakan cerminan pemikiran keislaman, kemanusiaan dan keindonesiaan.
2. NDP bagi kader HMI Cabang Palembang adalah dasar dalam perjuangan hidup, baik dalam berorganisasi, bermasyarakat, dan bernegara. Dalam rangka mencapai tingkat implementasi NDP bagi kader, HMI Cabang Palembang melaksanakan aktivitas-aktivitas pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar setiap kader memperoleh kesempatan mengkaji, memahami, menjiwai dan mengimplementasikannya. Adapun aktivitas-aktivitas pembinaan tersebut dimulai dari Masa Perkenalan Calon Anggota (MAPERCA), Latihan Kader I (LK I), LK II, LK III, sampai tingkatan yang paling tinggi, yaitu Training Instruktur NDP.

3. Cak Nur, sebagai figur organisatoris maupun intelektual bagi kader HMI cabang Palembang memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Tidak mengherankan bila ia masih tetap diidolakan oleh para kader HMI cabang Palembang dengan tidak menafikan tokoh-tokoh lainnya, seperti Deliar Noer, Akbar Tanjung dan lain-lain. Di samping itu juga, forum-forum kajian Cak Nur juga banyak mendapat perhatian dari kader-kader HMI cabang Palembang, seperti kajian tentang pluralisme (*kalimat as-sawa'*; semua agama itu baik), demokrasi, kesetaraan *gender* dan seterusnya. Satu hal lagi yang menarik dari yang telah disebutkan, bahwa bagi kader yang akan mengikuti Pelatihan Ideo-politik NDP disyaratkan membaca paling tidak 15 buku karya Cak Nur. Semua itu bisa menjadi indikator-indikator betapa masih berpengaruhnya Nurcholis Madjid baik secara personal maupun intelektual bagi kader HMI cabang Palembang secara umumnya, dan khususnya pemikiran-pemikirannya yang tertuang di dalam NDP HMI yang senantiasa dikaji dan diaktualisasikan oleh kader HMI cabang Palembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di antara bukti nyata adanya penerapan NDP HMI oleh kader HMI cabang Palembang yaitu melaksanakan berbagai gerakan seperti demonstrasi anti judi dan prostitusi, menyuarakan aspirasi masyarakat yang dirugikan oleh kebijakan pemerintah daerah dalam hal penimbunan rawa yang mengakibatkan kerugian karena banjir, menentang pembangunan gereja di atas lokasi pemakaman masyarakat muslim, menuntut reformasi pada masa Orde Baru, mengawal proses reformasi dalam segala aspek birokrasi pemerintahan, mengawal pemilu-kada agar terbebas dari segala bentuk KKN. Dari semua usaha pergerakan yang dilakukan oleh kader HMI cabang Palembang paling tidak telah mencerminkan nilai-nilai yang terkandung NDP HMI, di antaranya adalah *nilai individu dan masyarakat, nilai ketuhanan dan perikemanusiaan, serta nilai keadilan sosial*. Tetapi cukup disayangkan Implementasi NDP HMI tersebut di lingkungan

kader HMI cabang Palembang cenderung tidak konsisten, karena dari tujuh tema pokok NDP hanya tiga yang sudah diimplementasikan kader HMI Cabang Palembang. Yang demikian itu terjadi disebabkan oleh minimnya kegiatan atau aktivitas yang berkelanjutan dan tertata dengan baik dalam penerapan NDP tersebut pada HMI Cabang Palembang.

### **Saran**

Berdasarkan apa yang telah diungkapkan di atas, mengenai *Implementasi Nilai Dasar Perjuangan dalam Pembinaan Kader; Suatu Telaah terhadap Pemikiran Cak Nur pada HMI Cabang Palembang*, penulis perlu untuk memberikan beberapa saran berkenaan dengan hasil penelitian tersebut. *Pertama*, dalam membaca sejarah HMI cabang Palembang belum ada buku khusus tentang sejarah dan pergerakan HMI cabang Palembang, yang ditemukan di lapangan masih berbentuk dokumen-dokumen laporan para pengurus HMI Cabang Palembang terdahulu. Untuk itu penulis menyarankan kepada para kader di HMI Cabang Palembang, dan khususnya pengurus cabang agar melakukan usaha-usaha untuk menerbitkan buku tentang sejarah dan pergerakan HMI Cabang Palembang. Hal ini dipandang penulis perlu untuk dilakukan supaya para kader mendapat tahu tentang sejarah wadahnya. *Kedua*, Secara umum memang kader di lingkungan HMI kota Palembang mengerti betul tentang NDP HMI serta menjiwai dan berusaha untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, akan tetapi ada juga yang belum mampu untuk memperoleh pemahaman yang baik sehingga berdampak pada tidak tercerminnya NDP tersebut dalam kepribadiannya sebagai kader HMI. Setelah ditelusuri ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu, diantaranya masih kurangnya kader yang benar-benar pakar dalam bidang kajian NDP dan kurangnya minat serta keseriusan kader yang bersangkutan untuk mengikuti

kajian-kajian tentang NDP. Untuk itu penulis menyarankan kepada Pengurus HMI cabang agar senantiasa meningkatkan kemampuan para kadernya dalam memahami NDP sehingga dapat mewarnai kader lainnya, disamping itu perlu mengintensifkan latihan tingkat dasar dan tingkat lanjutan mengenai NDP bagi kader-kadernya yang dibarengi dengan *follow up* yang berkelanjutan.

Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan berkenaan dengan tema *Implementasi Nilai Dasar Perjuangan dalam Pembinaan Kader; Suatu Telaah terhadap Pemikiran Cak Nur pada HMI Cabang Palembang*, penulis sempat terbaca sekaligus penuturan beberapa *informan* penelitian yang menuturkan tentang makna independensi HMI yang merupakan salah satu tujuan dari HMI itu sendiri sebagai organisasi pengkaderan. Untuk itu penulis mengharapkan dan merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji secara komprehensif tentang *Persepsi Anggota HMI terhadap Makna Independensi dalam kehidupan berorganisasi pada HMI Cabang Palembang*.